

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**O L E H :  
PURNAMA SITIO  
NPM 15.833.0038**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh:

**PURNAMA SITIO  
158330038**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
201**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

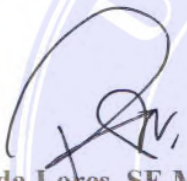
Access From (repository.uma.ac.id)

**LEMBARAN PENGESAHAN**

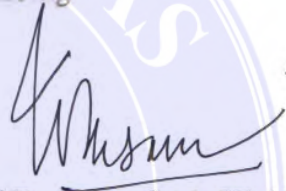
Judul skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  
Kinerja Keuangan Pamarintah Daerah Provinsi Sumatera  
Utara  
Nama : Purnama Sitio  
Npm : 158330038

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

  
**Linda Lores, SE,M.Si**

Pembimbing I

  
**Warsani Purnama Sari, SE,AK,CA,MM**

Pembimbing II

  
**Dr. Ihsan Effendi, SE,M.Si,**

Dekan

  
**Ilham Ramadhan Nasution, SE,AK,Msi,CA**

Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 01 Oktober 2019

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adanya bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulis ilmiah. Apabila kemudian dari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Medan, 01 Oktober 2019



Purnama Sitio  
(158330038)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purnama Sitio  
NPM : 158330038  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty – free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

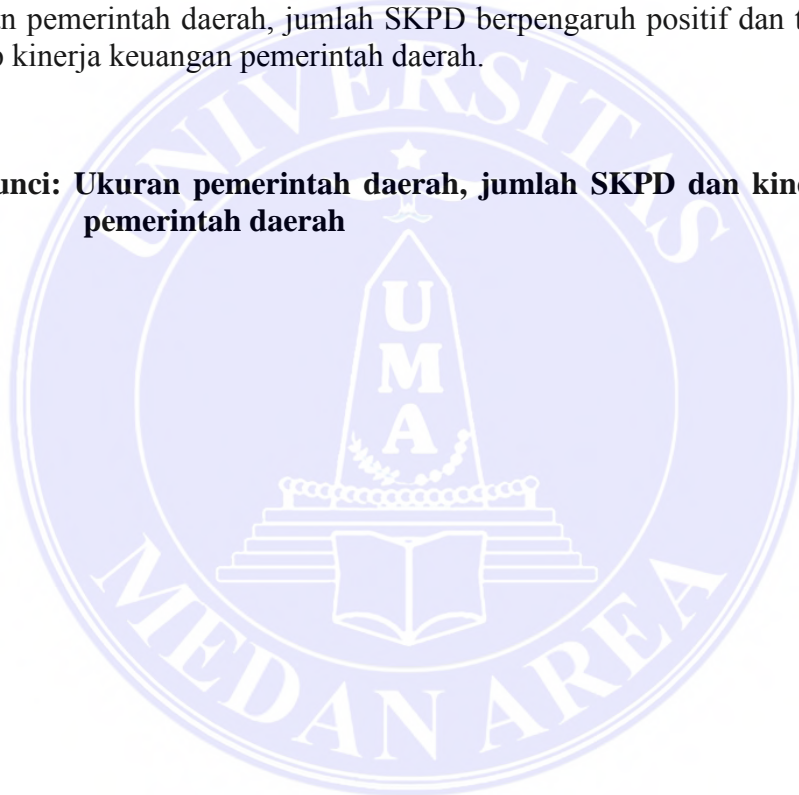
Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019  
Yang menyatakan

  
(Purnama Sitio)  
158330038

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, dan jumlah SKPD baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara tahun 2015, 2016 dan 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dan dokumentasi dari 33 LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda, dengan SPSS versi 25 hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, jumlah SKPD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci: Ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan kinerja keuangan pemerintah daerah**



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of size regional government and total SKPD both partially and simultaneously at financial performance of local government in Province North Sumatera. The type of research that is used is the quantitative method. The population in this study was the north Sumatera provincial and district LKPD in year 2015, 2016 and 2017. The type of data used in this study is secondary data. Data collection techniques used the purposive sampling and documentation method from 33 district LKPD and city of north sumatera province. Data analysis techniques used in the study are multiple linear regression analysis, with SPSS version 25 the results of the study show that the size of the region has a positive and not significant effect on the financial performance of local.*

***Keywords : size of regional government, total SKPD and financial performance of localgovernment***



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas banyak kendala. Namun atas berkat karunia dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini terseleikan dengan baik, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Rahman, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Heri Syahrial, SE, MSi selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Busnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nst,SE,AK,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE,M.Si selaku Ketua skripsi penulis sekaligus dosen pembimbing I skripsidan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan



dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Warsani Purnama Sari, SE,Ak,MM selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE,M.Ak selaku Dosen Sekretaris skripsi yang telah meluangkan waktu dan telah banyak membantu dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
9. Terimakasih untuk Pemerintahan Wali Kota Medan yang memberikan saya izin melakukan obyek penelitian di Pemerintahan Wali Kota Medan dan para pegawai pemerintahan kota medan.
10. Sangat istimewa kedua orang tua saya tercinta, Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu penyemangat dalam hidup saya. Yang selalu sabar mendidik saya, mengarahkan saya agar menjadi anak yang berguna. Terimakasih Ayah dan Ibu telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dalam hidupku yang telah mendukung dan memberikan saya kasih sayang yang tulus dengan membimbing yang selalu mendoakan saya serta memberikan dukungan moral maupun materi sehingga saya kuliah sampai sarjana.

11. Kakak, Abang, Adek saya yang tercinta yang saya sayangi dan yang menyayangi saya yang selalu memberikan motivasi dan nasihat yang berguna, dan tidak
12. terlupakan kepada saudara-saudara saya yang mendukung saya terimakasih atas dukungan dan doanya.
13. Sahabat-sahabat saya yang kusayangi Dewi Sartika Nadeak, Tasya Grace Sihaloho, Mei Hutaso, Arini Isadora Harahap, penyemangat saya dikampus yang membantu saya dan juga yang selalu memahamiku selama ini.
14. Teman-teman akuntansi Kelas Pagi Angkatan 2015 terimakasih untuk semuanya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada saya, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan jika di dalam skripsi ini banyak kata-kata yang salah atau penyajiannya yang kurang sempurna saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua. Amin

Medan, 01 Oktober 2019

Penulis

PURNAMA SITIO

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> ... ..	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) .....	6
2.2 Kinerja Keuangan pemerintah Daerah.....	11
2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah.....	14
2.3.1 Ukuran Daerah .....	14
2.3.2 Satuan Kinerja Perangkat Daerah(SKPD) .....	16
2.4 Indikator Karakteristik dan Indikator Kinerja Keuangan .....	16
2.4.1 Indikator Karakteristik .....	16
2.4.2 Indikator Kinerja Keuangan .....	17

2.5 Penelitian Terdahulu .....	17
2.6 Kerangka Konseptual .....	20
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	21
2.7.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan .....	21
2.7.2 Pengaruh jumlah SKPD Terhadap Kinerja Keuangan .....	22
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Waktu Penelitian .....	23
3.1.1 Jenis Penelitian .....	23
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	23
3.1.3 Waktu Penelitian .....	24
3.2 Populasi dan Sampel .....	24
3.2.1 Populasi .....	24
3.2.2 Sampel .....	25
3.3 Defenisi Oprasional Variabel .....	25
3.4.1 Variabel Independen .....	26
3.4.2 Variabel Dependen .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4.1 Jenis Data .....	28
3.4.2 Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	30
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	30

3.6.2.1 Uji Normalitas .....	30
3.6.2.2 Uji Autokorelasi .....	31
3.6.2.3 Uji Multikolinieritas .....	31
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	32
3.6.3 Analisis Regresi Berganda .....	32
3.6.4 Uji Hipotesis .....	34
3.6.4.2 Uji Parsial (Uji t) .....	34
3.6.3.3 Uji Simultan (Uji F) .....	34
3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	34
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	36
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) .....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....	37
4.2 Deskriptif Hasil Penelitian .....	38
4.3 Sampel Penelitian .....	38
4.4 Analisis Data Penelitian .....	41
4.4.1 Uji Statistik Deskriptif .....	42
4.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
4.4.2.1 Uji Normalitas .....	44
4.4.2.3 Uji Autokorelasi .....	46
4.4.2.4 Uji Multikolinieritas .....	47
4.4.2.5 Uji Heteroskedastisitas .....	48

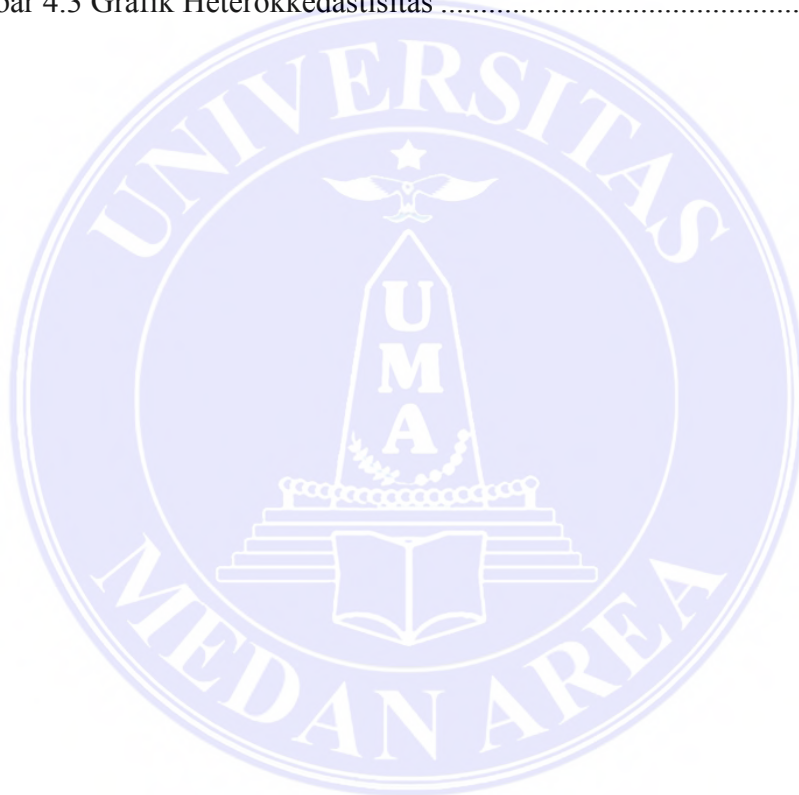
4.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	49
4.4.4 Uji Hipotesis .....	50
4.4.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	50
4.4.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	52
4.4.4.3 Uji Kolerasi koefesien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	53
4.5 Pembahasan.....	54
4.5.1 Pengaruhukuran (Size) pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
4.5.2 Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	55
<b>BAB V: KESIMPULAN.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran Bagi Pemerintah Daerah .....	57
5.3 Saran Bagi PenelitiSelanjutnya.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Oprasiaonal Variabel.....	26
Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel .....	33
Tabel 4.2 Asset, Jumlah SKPD, dan Efisiensi Kinerja .....	38
Tabel 4.3 Statistik Deskrtif.....	42
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	44
Tabel 4.5 Uji Autokolerasi.....	46
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t).....	50
Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F).....	52
Tabel 4.10 Uji Kolerasi Dan Determinasi.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan .....	36
Gambar 4.2 Grafik P-Plot.....	45
Gambar 4.3 Grafik Heterokedastisitas .....	48





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1996 dan puncaknya pada tahun 1997. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat mendorong pendelegasian sebagai wewenang pemerintah pusat dalam pelayanan atas dasar keuangan daerah sendiri dan membiayai pembangunan. Pada tahun 1998 terjadi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah membawa perubahan bagi politik dan sistem pemerintahan maupun administrasi keuangan negara yang diawali dengan perubahan system organisasi. Perubahan organisasi teknik prosedur pemerintah mengalihkan dari sentralistik ke desentralistik. Tujuan desentralisasi diindonesi adalah untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing. Pengelolaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas bantuan publik yang lebih baik. Menyiapkan infrastruktur merupakan kunci akan pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No.

22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan bertugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adi (2005) menyatakan pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintahan belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak yang terjadi kesenjangan antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidak seimbangan pembangunan pada daerah-daerah

tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintah yang baik (Halacmi, 2005).

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dimana kinerja keuangan digunakan sebagai variabel Dependen. Sedangkan penelitian karakteristik pemerintah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan dipemerintah daerah di Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah.

Penelitian yang Suhardjanto et al., (2010) menyatakan Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Ukuran pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012). Berdasarkan penelitian

Sumarjo (2010) peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik dan akuntansi sektor pemerintahan yaitu yang berkaitan dengan pengembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap periodennya guna untuk perbaikan kinerja yang dimasa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi para Akademis

Peneliti ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman yang lebih baik terutama mengenai karakteristik pemerintah daerah.

#### 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai karakteristik pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

#### 3. Pihak Masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai tujuan secara umum, Bastian (2006:) menyebutkan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya;

- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya;
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya;
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24/2005, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi, Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas

Laporan Keuangan dengan diberlakukan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami berbagai pihak terutama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dalam menjalankan tugasnya (PP No. 24/2005). Komponem yang harus disajikan dalam Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu:

#### 1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelepasan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Aset tetap
- 6) Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek
- 7) Ekuitas



## 2. Laporan Realisi Anggaran

Tujuan pelaporan realisi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan Realisi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

## 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

## 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

## 5. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 6. Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Catatan Atas Pelaporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

## 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Azhar (2008),

menyatakan bahwa kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah (2007), menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2012). “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998) dalam (Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian, 2006: 275). Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012). Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya. Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) dan Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012), menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian
- b. Rasio Efektivitas
- c. Rasio Efisiensi
- d. Rasio Aktivitas
- e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
- f. Rasio Pertumbuhan

### **2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah**

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yaitu mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006). Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, jumlah SKPD, kesejahteraan functional differentiation, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, leverage daerah, dan intergovernmental revenue (Suhardjanto et al, 2010). Penelitian ini menggunakan Ukuran daerah dan Jumlah SKPD sebagai proksi dari karakteristik pemerintahan daerah.

#### **2.1.3 Ukura daerah**

Ukuran daerah adalah salah satu elemen dari struktur organisasi dan prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi Patrick (2007) dan

Suharjanto, Yulianingtyas (2011). Penelitian ini dilakukan oleh Sukirto (2007) yang menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi besar. Semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Begitu pula terhadap pemerintahan, menurut Susilawati (2016) menyatakan bahwa suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintahan daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan Ukuran daerah adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

### 2.2.3 Satuan Kenerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Pemerintah). Status kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi pada pemerintah daerah yang wajib menyajikan laporan keuangan untuk di konsolidasikan menjadi LKPD (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah). Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) merupakan bagian dari diferensial fungsional. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif termasuk nilai yang relevan.

## 2.4 Indikator Karakteristik dan Indikator Kinerja Keuangan

### 2.4.1 Indikator karakteristik

Menurut Bastian (2006) indikator karakteristik ukuran pemerintahan dan jumlah SKPD terdiri dari:

a. indikator ukuran pemerintah

1. pengukuran atau penilaian dalam keuangan
2. pengambilan keputusan dan akuntabilitas.



b. indikator jumlah SKPD

1. penyusunan dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja pemerintah daerah
2. mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
3. kelengkapan informasi yang disajikan terhadap laporan keuangan.

**2.4.2 Indikator kinerja keuangan**

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Efisiensi
4. Rasio Aktivitas
5. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
6. Rasio Kemandirian

**2.5. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah mencoba memaparkan hubungan antara ukuran, dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang menggunakan alat analisis yang sama, namun memiliki hasil yang beragam. Perbedaan hasil ini tentu memberikan pandangan dan penguatan akan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh mengenai tema dan permasalahan yang ada.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Kusumawar dani, (2012)	Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: 1. ukuran(size) pemerintah 2. legislatif 3. leverage	Hasil dari penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa size dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan.	Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah Variabel independen: 1. ukuran pemerintah	Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan kemakmuran,

			daerah 2.kemakmuran 3.intergovernm ental revenue	intergovernmental revenue dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali.
3.	Sumarjo (2010)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)	Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah Variabel independen: 1.ukuran daerah 2.ukuran legislative	Dalam penelitian ini memperoleh hasil yaitu size, leverage, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun kemakmuran dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Nur Lailatul dan Khasanah (2014)	Pengaruh karakteristik kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan	Variabel dependen: pengungkapan laporan keuangan Variabel independen: 1.umur pemerintah	penelitian menunjukkan bahwa dari variabel yang menggambarkan karakteristik pemerintah daerah, hanya total asset yang berpengaruh positif

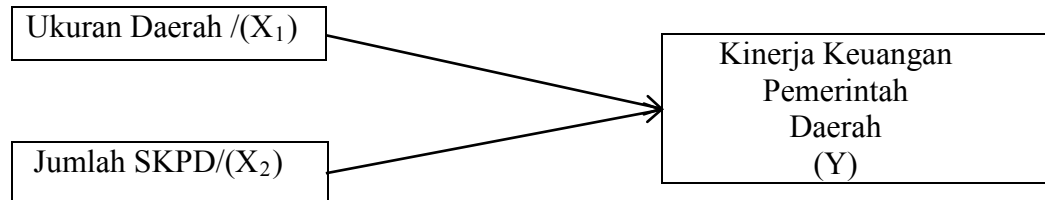
		laporan keuangan pemerintah daerah	2.jumlah SKPD 3.kekayaan 4.tingkat ketergantungan	dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan variabel lain berupa kekayaan daerah(PAD), Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh secara signifikan. Sementara dari kompleksitas pemerintah, hanya variabel jumlah SKPD yang memiliki pengaruh.
--	--	------------------------------------	---	--

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah diprosikan kedalam ukuran pemerintah dan jumlah SKPD. Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 2.1

## Kerangka Konseptual



## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran daerah dan jumlah SKPD. Berikut ini adalah pengembangan hipotesis untuk masing-masing karakteristik pemerintah daerah.

### 2.7.1 Pengaruh ukuran pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyani (2012) serta Kusumawardani (2012) bahwa ukuran Pemda berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara.

## **2.6.2 Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merepresentasikan diferensiasi fungsional di pemerintahan daerah. SKPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain dari itu SKPD merupakan suatu sarana dalam berbagai ide, informasi, dan inovasi. Didalam sebuah pemerintahan daerah jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja keuangan SKPD semakin baik pula (Patrick, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian (Damanpour, 2007) yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD (functional differentiation) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis.

$H_2$  : terdapat pengaruh positif jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, (2011) “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”.

Menurut Siregar, (2013) “penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengurut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memperlumuskan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti kebenaran, memperoleh jawaban atau masalah, pengembangan ilmu sampel tertentu.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat pelaksanaan suatu penelitian. penelitian dilakukan pada kantor BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 22, Masdras Hulu, Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara.

### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2019 sampai dengan selesai dengan rincian waktu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2019							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Pembuatan Proposal	■	■						
2.	Seminar Proposal			■					
3.	Pengumpulan Data				■	■	■		
4.	Analisis Data						■		
5.	Penyusunan Skripsi							■	
6.	Seminar Hasil							■	
7.	Pengajuan Sidang								■

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Menurut Sekaran (2006), populasi dapat dijelaskan sebagai kumpulan atau kelompok orang, peristiwa atau sesuatu yang menarik minat peneliti untuk



melakukan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah LKPD pemerintahan daerah Provinsi Sumatera utara.

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi (Sekaran, 2006). Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Jogiyanto, 2005). Adapun kriteria sampel sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Pada sampel tersebut, menyediakan jumlah SKPD kabupaten dan kota Provinsi Sumatera utara.
3. Sampel dalam penelitian adalah 33 LKPD kabupaten dan kota tahun 2015, 2016 dan 2017

### 3.3 Defenisi Oprasional Variabel

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/ objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu, variabel independen dan variabel

dependen. Ada pun pengukuran dan defenisi masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen(Sugiyono, 2013).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel idependen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik berpengaruh secara positif maupun negatif (sekaran, 2006). Dalam penelitan ini yang menjadi variabel independen yaitu ukuran pemerintahan dan jumlah SKPD pada pemerintah daerah provinsi sumatera utara. Oprasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Oprasiaonal Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Devenisi oprasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
<b>1</b>			<b>ukur</b>
Ukuran Pemerintahan(x)	Suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecilnya pemerintahan.Ukuran pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan total asset, jumlah pendapatan, jumlah karyawan dan tingkat produksi(Damanpour,2008).Penelitian ini menggunakan total asset pemerintahan	1).pengukuran atau penilaian dalam keuangan 2).pengambilan	R A S I O

	<p>daaaerah. Total asset suatu daerah dalam penelitian ini merupakan log dari asset yang terdiri asset tetap maupun asset lancar.</p> $\text{Asset} = \text{Total Asset}$	keputusan dan akuntabilitas	
Jumlah SKPD	<p>Fungsi yang dilaksanakan SKPD berdasarkan objek penyelenggaraanya, yaitu pelaksanaan fungsi yang berkaian dengan penyusunan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Pengukuran jumlah SKPD dalam penelitian ini menggunakan total seluruh SKPD pemerintahan daerah .</p> $\text{SKPD} = \text{Total SKPD}$	<p>1).Penyusunsn yang dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kinerja pemerintah daerah</p> <p>2).mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan</p> <p>3.kelengkapan informasi yang disajikan terhadap laporan keuangan</p>	<p>I N T E G R A T I O N</p>

Kinerja keuangan (Y)	<p>Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efesiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003). Perhitungan rasio efesiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hamzah, 2009). Proksi kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Maiyora, 2015) karena efisiensi merupakan rasio yang umum dan banyak digunakan dalam penelitian.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}}</math> </div>	<p>1). Rasio Kemandirian 2). Rasio Efektivitas 3). Rasio Efesiensi 4). Rasio Aktivitas 5). <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) 6). Rasio Kemandirian</p>	<p>R A S I O</p>
----------------------	---	--	----------------------------------

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008).

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiono (2005) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan kepada peneliti. Misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan stufi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu penelitian mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dari LKPD kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara langsung melalui dokumen yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang meliputi analisis regresi berganda, determinasi, simultan dan T-test. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan dengan program SPSS 25.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan distribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 10%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian ini adalah apabila p value > 0,5 maka data

berdistribusi secara normal, sedangkan apabila  $p \text{ value} < 0,5$  data tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung juga dengan normal probability plot.

### 3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Tujuan dari dilakukan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110). Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model terdapat autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan alat uji Runs Test. Kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan uji statistik Runs Test menurut Ghozali, (2011: 111) yaitu :

- a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti terjadi gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

### 3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol) (Ghozali, 2011 : 105). Untuk mengukur multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independenlainnya. Jika nilai tolerance $\leq 0,1$  dan VIF $\geq 10$ , mengartikan bahwa data tersebut terjadi multikolinieritas. Jika nilai tolerance $\geq 0,1$  dan VIF $\leq 10$ , dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas dalam data penelitian tersebut (Ghozali, (2011: 106).

#### **3.6.2.4 Uji Heterokkedastisitas**

Uji Heterokkedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Artinya, Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### **3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Penggunaan model regresi berganda (multiple regression analysis) dipilih karena variabel ini terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen (Sekaran, 2006). Menurut, Sugiono (2011) analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan



bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Untuk melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003).

Perhitungan regresi berganda dinyatakan dalam persamaan :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien ukuran daerah

$b_2$  = Koefisien Jumlah satuan kerja perangkat daerah

$X_1$  = Ukuran daerah

$X_2$  = Jumlah satuan kerja perangkat daerah

e = Standart error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gozali, 2013). Cara untuk mengetahuinya apakah signifikan atau tidak terhadap variabel dependen maka digunakan signifikan level sebesar 0.05. jika nilai signifikan (p value) > 0,5 maka secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, bila signifikan (p value) > 0,5 maka secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.4.2 Pengujian Simultan (F)

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95 %.

$$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0 \text{ ditolak}$$

$$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0 \text{ diterima}$$

#### 3.6.4.3 Pengujian Koefisien Derterminasi (Adjusted R2)

Untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh antara variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen (Y). Jika ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) adalah besar terhadap variabel

depenenden (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika ( $R^2$ ) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen semakin kecil.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda dengan program SPSS. Data sampel sebanyak 99 LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara yang diaudit oleh BPK.

Dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di sumatera utara pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total asset dimana ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan lebih memiliki tekanan yang lebih besar untuk melakukan transparansi atas laporan keuangannya.

2. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan dalam variabel bebas dimana Jumlah SKPD diukur dengan menggunakan seluruh total SKPD. Jumlah SKPD dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak SKPD dalam suatu pemerintahan daerah maka semakin dapat terlihat hasil kinerja keuangan dalam suatu pemerintahan.

## **5.2 Saran Bagi Pemerintah Daerah**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien, maka diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.

## **5.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan laporan keuangan yang terbaru yang telah diaudit oleh BPK sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik lagi. Peneliti juga merekomendasikan untuk menambahkan variabel-variabel lain selain yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. *Perilaku Opertunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Pendekatan Principal-Agency Theory*: Bengkulu
- Azhar, M. 2008. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah*. Jurnal Universitas Sumatera Utara
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*: Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Suatu Penganta*: Jakarta
- Garini, A. 2015. *Pengaruh belanja daerah, temuan audit dan size terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintahdaerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Sukarela dalam *Laporan Tahunan*: Surakarta
- Herminingsih, 2006. *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)*: Semarang
- Indrawan, Y. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin*.
- Jogiyanto. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*: Yogyakarta.
- Kusumawardani, M. 2012. *Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* : Yogyakarta.
- Mustikarini, W. A., Fitriasari, D. 2012. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaen/kota di Indonesia tahun anggaran 2007*. *Simposium Nasional*: Banjarmasin
- Naim, A., dan F. Rakhman. 2007. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe*

*Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia: Jakarta*

Patton, T. K., and D. R. Bean. 2001. *The why and how of the new capital asset reporting requirements. Public Budgeting and Finance: Jakarta*

Peraturan Pemerintah, 2005. *Standart Akuntansi Pemerintahan.: Jakarta*

Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga: Jakarta*

Retnoningsih, H. 2009. *Influence of Parliament Characteristics Disclosure Compliance in Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta: Surakarta*

Renas, Dul Muid. 2009. *Pengaruh Karakteristik Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro: Bandung*

Rochmah, S. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Sigit Indra, L. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Jurnal Fakultas Ekonomi: Surakarta*

Suryo Sakti, H. 2010. *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewewenangannya. Graha Ilmu: Jakarta*

Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristick: Evidence from Indonesia Municipalities.*

Sucahyu, H. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.*

Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*

Surepno. (2013). *Pengaruh return on equity (ROE), ukuran (Size) dan kemakmuran (Wealth) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia* : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang







UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ASSET	99	27.20	31.05	28.2311	.65366
SKPD	99	10.00	45.00	21.6061	8.96913
KINERJA	99	3.45	63.69	27.9637	10.47022
Valid N (listwise)	99				

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

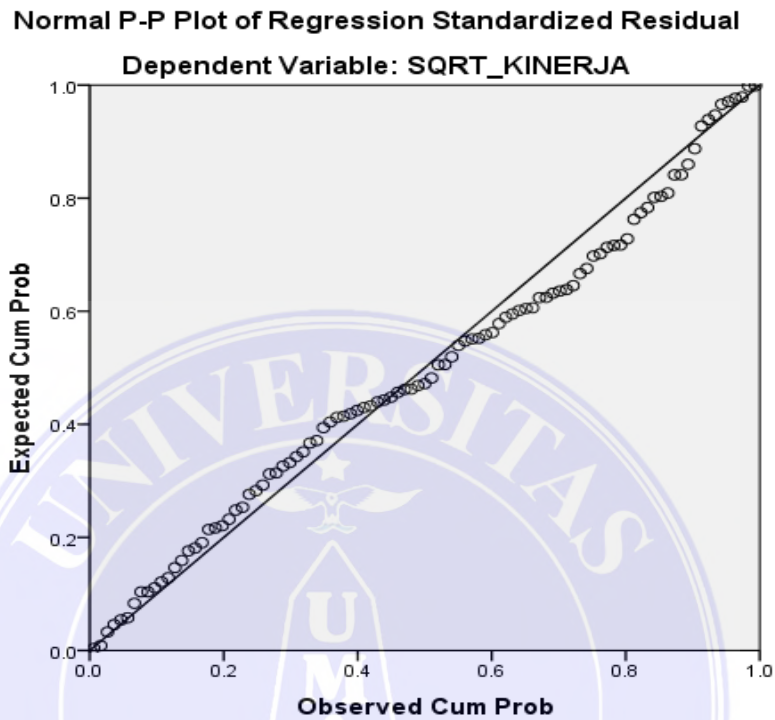
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.8128658
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.236

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : output SPSS

**Gambar 4.1**  
**Grafik P-Plot**



**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokolerasi**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.73964
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	50
Total Cases	99
Number of Runs	50
Z	-.100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.920

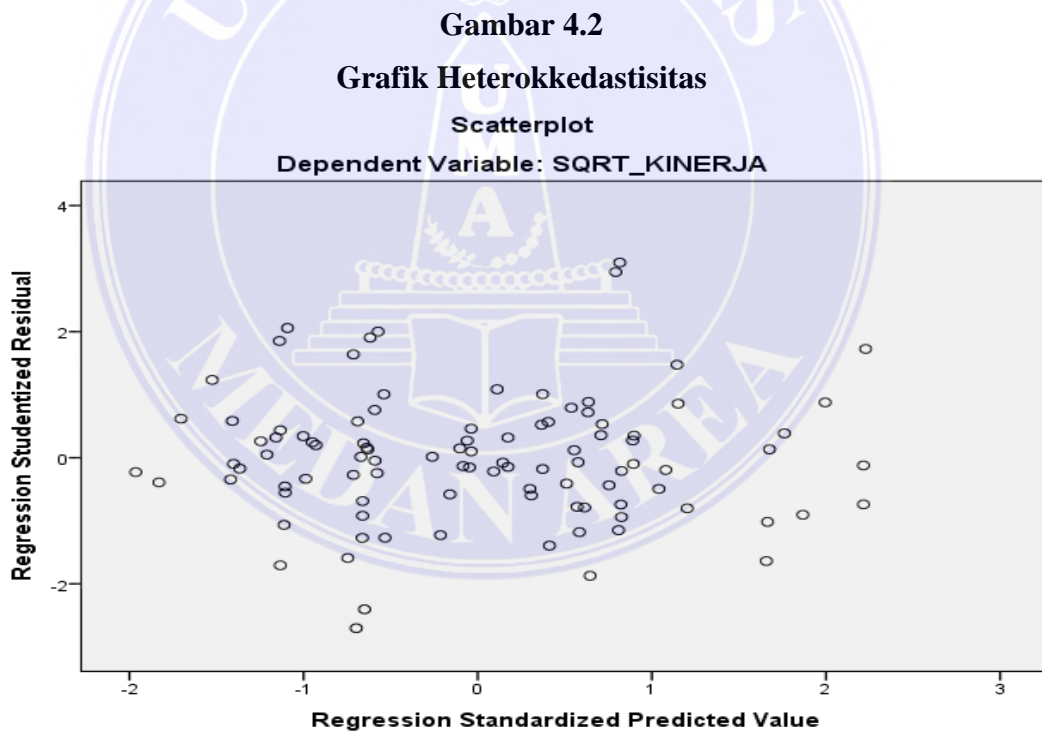
a. Median

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	69.330	43.292			
ASSET	-1.763	1.533	-.110	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS



**Tabel 4.5**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	69.330	43.292		1.601	.113		
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69.330	43.292		1.601	.113
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.062	2	.031	3.324	.724 <sup>b</sup>
	Residual	9.107	96	.095		
	Total	9.169	98			

a. Dependent Variable: SQRT\_KINERJA

b. Predictors: (Constant), SQRT\_SKPD, SQRT\_ASSET

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Kolerasi Dan Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 <sup>a</sup>	.322	.203	9.91456

a. Predictors: (Constant), SKPD, ASSET

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.2**  
**Asset, Jumlah SKPD, dan Efisiensi Kinerja**

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Asset(Rp)	Jumlah SKPD	Kinerja keuangan (%)
1	Kab.Asahan	2015	3.070.087.169.481	21	0.871609905
		2016	3.230.743.738.941	21	0.44307987
		2017	3.257.232.990.543	21	0.58801465
2	kab.batu bara	2015	1.208.225.250.939	11	0.778733176
		2016	1.634.983.178.863	11	0.464208568
		2017	1.953.901.338.959	11	0.507693124

3	kab.dairi	2015	1.697.871.314.268	27	0.847131971
		2016	1.862.736.799.468	27	0.629863922
		2017	1.912.571.435.170	27	0.540672888
4	kab.deli serdang	2015	4.659.732.843.054	21	0.439862732
		2016	6.152.368.379.435	21	0.48417151
		2017	6.830.055.237.857	21	0.491285947
5	kab.humbang hansundutan	2015	1.543.303.952.725	16	0.463904428
		2016	1.744.282.122.538	16	0.449947516
		2017	1.725.640.557.780	16	0.482262191
6	kab.karo	2015	1.890.653.365.765	11	0.505684398
		2016	1.921.654.852.059	11	0.608152519
		2017	2.282.955.372.592	11	0.665852448
7	kab.labuhan batu	2015	2.190.772.786.348	13	0.505576251
		2016	2.501.444.360.858	13	0.456389907
		2017	2.500.309.000.870	13	0.769133964
8	kab.labuhan batu selatan	2015	1.013.394.220.215	23	0.467010092
		2016	1.176.711.936.981	23	0.474364085
		2017	1.196.845.479.711	23	0.481308027
9	kab.labuhan batu utara	2015	2.207.715.943.933	32	0.336661204
		2016	2.188.698.815.512	32	0.330352138
		2017	2.373.700.486.908	32	0.443507959
10	kab.langkat	2015	2.830.460.798.519	12	0.53731432
		2016	3.406.752.831.891	12	0.438885794
		2017	2.830.460.798.519	12	0.479792646
11	kab.mandailing natal	2015	1.253.689.163.699	12	0.600503294
		2016	1.970.863.374.638	12	0.445225803
		2017	1.817.530.352.612	12	0.479723726
12	kab.nias	2015	1.362.426.016.984	16	0.422775352
		2016	1.498.497.455.141	16	0.518613612
		2017	1.601.534.275.367	16	0.460324256
13	kab.nias barat	2015	649.590.088.448	10	0.474118403
		2016	794.261.576.021	10	0.424570048
		2017	955.244.198.893	10	0.48172026
14	kab.nias selatan	2015	1.490.811.288.765	12	0.417669445
		2016	1.493.386.650.705	12	0.593608868
		2017	1.547.876.111.943	12	0.674971933
15	kab.nias utara	2015	958.403.717.018	16	0.342007255
		2016	1.422.080.957.433	16	0.546112319
		2017	1.649.128.696.546	16	0.516681954
16	kab.padang lawas	2015	1.367.847.931.183	29	0.65267462
		2016	1.273.064.700.908	29	0.486920577
		2017	1.332.727.214.237	29	0.603195185

17	kab.padang lawas utara	2015	1.069.645.031.668	30	0.589869404
		2016	1.181.750.931.335	30	0.43125916
		2017	1.291.843.474.045	30	0.634400697
18	kab.pakpak bharat	2015	849.891.874.310	25	0.457296642
		2016	912.481.989.844	25	0.651728745
		2017	916.547.952.787	25	0.465793565
19	kab.samosir	2015	1.262.107.078.913	10	0.46107753
		2016	1.593.266.053.881	10	0.42528907
		2017	1.477.140.679.705	10	0.413041285
20	kab.serdang begadai	2015	1.223.700.739.949	11	0.510030656
		2016	1.761.364.481.265	11	0.441092133
		2017	1.828.864.944.591	11	0.486105175
21	kab.simalungu n	2015	2.773.651.761.566	21	0.417412483
		2016	3.028.693.942.918	21	0.420799343
		2017	3.061.935.914.469	21	0.512308082
22	kab.tapanuli selatan	2015	1.741.870.850.744	15	0.542500426
		2016	1.789.394.962.256	15	0.439781843
		2017	1.947.961.698.352	15	0.602522683
23	kab.tapanuli tengah	2015	1.161.775.798.454	17	0.422827855
		2016	1.206.574.834.404	17	0.76848268
		2017	1.221.090.796.655	17	0.572530024
24	kab.tapanuli utara	2015	341.872.401.351	28	0.554966484
		2016	2.008.985.435.220	28	0.461916494
		2017	1.887.854.571.200	28	0.423881926
25	kab.toba samosir	2015	1.521.423.381.803	23	0.495226962
		2016	1.593.266.053.881	23	0.439987001
		2017	1.477.140.679.705	23	0.649583158
26	kota binjai	2015	1.315.764.837.539	26	0.423009341
		2016	1.094.699.530.587	26	0.538099804
		2017	1.091.763.938.817	26	0.488814387
27	kota gunungsitoli	2015	1.331.445.520.776	32	0.542448223
		2016	1.321.384.031.522	32	0.488833192
		2017	1.303.844.084.370	32	0.426937545
28	kota medan	2015	29.940.354.805.687	25	0.543554731
		2016	29.958.683.673.011	25	0.514636547
		2017	30.527.773.136.028	25	0.501974925
29	kota p.sidempuan	2015	922.779.404.741	36	0.492334271
		2016	1.146.652.789.323	36	0.685858577
		2017	1.219.398.699.868	36	0.418943573
30	kota pematangsiant ar	2015	4.927.232.762.368	36	0.547975146
		2016	2.946.216.853.168	36	0.413258699
		2017	2.960.783.917.911	36	0.496944503



31	kota sibolga	2015	1.724.268.747.536	20	0.566308993
		2016	1.465.138.453.120	20	0.587412121
		2017	1.361.600.412.154	20	0.516634481
32	kota tanjungbalai	2015	1.115.346.240.600	45	0.459134031
		2016	1.271.940.346.895	45	0.471663156
		2017	1.485.552.202.047	45	0.560571235
33	kota tebing tinggi	2015	1.442.229.736.501	31	0.446653428
		2016	1.524.810.502.227	31	0.498258204
		2017	1.689.059.696.131	31	0.439254884



**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2015**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 1,711,309,726,472	Rp 1,963,389,490,120	0.871609905
KAB. BATU BARA	Rp 715,580,912,093	Rp 918,903,848,065	0.778733176
KAB.DAIRI	Rp 753,620,295,971	Rp 889,613,804,786	0.847131971
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,086,517,094,707	Rp 2,470,127,645,321	0.439862732
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 451,965,422,391	Rp 974,264,084,398	0.463904428
KAB.KARO	Rp 743,586,491,997	Rp 1,470,455,672,993	0.505684398
KAB.LABUHAN BATU	Rp 106,683,184,179	Rp 211,013,045,067	0.505576251
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 340,794,628,209	Rp 729,737,181,477	0.467010092
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 287,775,579,479	Rp 854,792,818,984	0.336661204
KAB.LANGKAT	Rp 1,085,744,976,614	Rp 2,020,688,705,016	0.53731432
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 729,799,149,297	Rp 1,215,312,483,262	0.600503294
KAB.NIAS	Rp 114,029,482,299	Rp 269,716,485,807	0.422775352
KAB.NIAS BARAT	Rp 220,916,322,103	Rp 465,951,797,914	0.474118403
KAB NIAS SELATAN	Rp 340,356,840,214	Rp 814,895,233,564	0.417669445
KAB.NIAS UTARA	Rp 216,044,511,423	Rp 631,695,697,854	0.342007255
KAB.PADANG LAWAS	Rp 468,328,633,119	Rp 717,553,001,820	0.65267462
KAB.PADANG UTARA	Rp 432,517,069,286	Rp 733,242,081,371	0.589869404
KAB PAKPAKBHARAT	Rp 216,299,948,149	Rp 472,997,018,284	0.457296642
KAB.SAMOSIR	Rp 405,052,883,127	Rp 878,491,916,720	0.46107753
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 647,381,407,447	Rp 1,269,299,011,031	0.510030656
KAB.SIMALUNGUN	Rp 805,999,839,527	Rp 1,930,943,305,381	0.417412483
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 330,572,337,151	Rp 609,349,451,816	0.542500426
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 415,555,956,448	Rp 982,801,750,678	0.422827855
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 620,003,108,189	Rp 1,117,190,183,201	0.554966484
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 435,052,883,127	Rp 878,491,916,720	0.495226962
KOTA BINJAI	Rp 441,499,833,565	Rp 1,043,711,784,005	0.423009341
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 337,808,594,206	Rp 622,748,088,670	0.542448223
KOTA MEDAN	Rp 2,315,023,783,421	Rp 4,259,044,490,715	0.543554731
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 537,323,228,827	Rp 1,091,378,886,503	0.492334271
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 423,263,248,938	Rp 772,413,223,571	0.547975146
KOTA SIBOLGA	Rp 515,244,210,273	Rp 909,828,761,819	0.566308993
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 412,885,424,157	Rp 899,269,921,011	0.459134031
KOTA TEBING TINGGI	Rp 521,271,835,464	Rp 1,167,061,086,952	0.446653428

**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2016**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 412,779,735,495	Rp 931,614,734,437	0.44307987
KAB. BATU BARA	Rp 535,821,085,934	Rp 1,154,267,979,856	0.464208568
KAB.DAIRI	Rp 669,360,541,625	Rp 1,062,706,591,682	0.629863922
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,506,907,993,522	Rp 3,112,343,380,366	0.48417151
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 401,331,618,395	Rp 891,952,070,182	0.449947516
KAB.KARO	Rp 885,674,634,359	Rp 1,456,336,375,056	0.608152519
KAB.LABUHAN BATU	Rp 582,934,136,489	Rp 1,277,272,191,263	0.456389907
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 418,955,338,229	Rp 883,193,630,275	0.474364085
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 323,801,123,452	Rp 980,169,601,534	0.330352138
KAB.LANGKAT	Rp 972,152,721,864	Rp 2,215,047,135,449	0.438885794
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 634,486,773,300	Rp 1,425,089,851,138	0.445225803
KAB.NIAS	Rp 421,869,349,118	Rp 813,455,989,241	0.518613612
KAB.NIAS BARAT	Rp 428,343,290,634	Rp 534,832,477,458	0.424570048
KAB NIAS SELATAN	Rp 598,884,394,028	Rp 1,008,887,209,661	0.593608868
KAB.NIAS UTARA	Rp 635,821,085,934	Rp 1,164,267,979,856	0.546112319
KAB.PADANG LAWAS	Rp 511,056,773,272	Rp 1,049,569,061,025	0.486920577
KAB.PADANG UTARA	Rp 430,211,569,394	Rp 997,570,855,132	0.43125916
KAB PAKPAKBHARAT	Rp 334,463,563,919	Rp 513,194,432,899	0.651728745
KAB.SAMOSIR	Rp 331,327,121,113	Rp 779,063,334,471	0.42528907
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 632,273,756,040	Rp 1,433,427,866,991	0.441092133
KAB.SIMALUNGUN	Rp 933,573,821,664	Rp 2,218,572,431,172	0.420799343
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 531,374,684,633	Rp 1,208,268,811,127	0.439781843
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 821,635,314,857	Rp 1,069,165,690,561	0.76848268
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 553,318,208,783	Rp 1,197,874,974,979	0.461916494
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 431,017,574,178	Rp 979,614,336,729	0.439987001
KOTA BINJAI	Rp 519,071,277,320	Rp 964,637,550,866	0.538099804
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 345,222,202,510	Rp 706,216,779,805	0.488833192
KOTA MEDAN	Rp 2,217,114,414,970	Rp 4,308,116,916,024	0.514636547
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 742,623,861,611	Rp 1,082,765,291,218	0.685858577
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 337,714,890,391	Rp 817,199,713,937	0.413258699
KOTA SIBOLGA	Rp 366,224,346,378	Rp 623,453,846,568	0.587412121
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 310,382,893,361	Rp 658,060,502,765	0.471663156
KOTA TEBING TINGGI	Rp 352,745,566,614	Rp 707,957,368,504	0.498258204

**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2017**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 874,862,610,705	Rp 1,487,824,513,722	0.58801465
KAB. BATU BARA	Rp 542,328,987,209	Rp 1,068,222,044,635	0.507693124
KAB.DAIRI	Rp 613,011,790,602	Rp 1,133,794,210,279	0.540672888
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,145,698,401,581	Rp 2,332,039,840,502	0.491285947
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 458,486,923,628	Rp 950,700,535,730	0.482262191
KAB.KARO	Rp 967,620,766,777	Rp 1,453,205,992,340	0.665852448
KAB.LABUHAN BATU	Rp 895,500,282,097	Rp 1,164,296,889,256	0.769133964
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 431,313,983,198	Rp 896,128,797,799	0.481308027
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 465,806,214,724	Rp 1,050,277,014,266	0.443507959
KAB.LANGKAT	Rp 1,108,935,701,410	Rp 2,311,281,153,445	0.479792646
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 733,091,400,689	Rp 1,528,153,313,076	0.479723726
KAB.NIAS	Rp 411,115,137,288	Rp 893,099,010,450	0.460324256
KAB.NIAS BARAT	Rp 310,828,409,218	Rp 645,246,701,975	0.48172026
KAB NIAS SELATAN	Rp 760,398,721,627	Rp 1,126,563,468,536	0.674971933
KAB.NIAS UTARA	Rp 552,326,682,209	Rp 1,068,987,754,635	0.516681954
KAB.PADANG LAWAS	Rp 671,705,421,614	Rp 1,113,578,885,253	0.603195185
KAB.PADANG UTARA	Rp 649,532,941,395	Rp 1,023,852,818,104	0.634400697
KAB PAKPAKBHARAT	Rp 238,798,981,452	Rp 512,671,276,740	0.465793565
KAB.SAMOSIR	Rp 340,284,971,582	Rp 823,852,199,615	0.413041285
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 674,120,048,943	Rp 1,386,778,177,052	0.486105175
KAB.SIMALUNGUN	Rp 1,179,688,195,061	Rp 2,302,692,922,207	0.512308082
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 750,692,942,240	Rp 1,245,916,483,229	0.602522683
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 626,349,066,702	Rp 1,094,002,131,630	0.572530024
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 517,606,279,926	Rp 1,221,109,579,448	0.423881926
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 742,724,054,029	Rp 1,143,385,638,131	0.649583158
KOTA BINJAI	Rp 429,937,553,915	Rp 879,551,758,424	0.488814387
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 380,582,074,417	Rp 891,423,299,008	0.426937545
KOTA MEDAN	Rp 2,213,240,312,975	Rp 4,409,065,482,200	0.501974925
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 364,478,159,906	Rp 869,993,438,966	0.418943573
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 428,592,401,048	Rp 862,455,261,770	0.496944503
KOTA SIBOLGA	Rp 318,176,695,491	Rp 615,864,227,552	0.516634481
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 339,096,917,589	Rp 604,913,160,675	0.560571235
KOTA TEBING TINGGI	Rp 312,586,957,464	Rp 711,630,009,618	0.439254884

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
PURNAMA SITIO  
NPM 15.833.0038**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh:

**PURNAMA SITIO  
158330038**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
201**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19


Access From (repository.uma.ac.id)

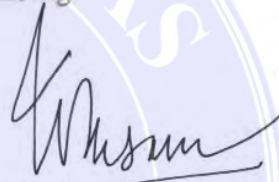
**LEMBARAN PENGESAHAN**

Judul skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  
Kinerja Keuangan Pamarintah Daerah Provinsi Sumatera  
Utara  
Nama : Purnama Sitio  
Npm : 158330038


Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

  
Linda Lores, SE,M.Si  
Pembimbing I

  
Warsani Purnama Sari, SE,AK,CA,MM  
Pembimbing II

  
Dr. Ihsan Effendi, SE,M.Si,  
Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE,AK,Msi,CA  
Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 01 Oktober 2019

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adanya bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulis ilmiah. Apabila kemudian dari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Medan, 01 Oktober 2019



Purnama Sitio  
(158330038)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

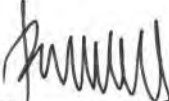
Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purnama Sitio  
NPM : 158330038  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty – free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

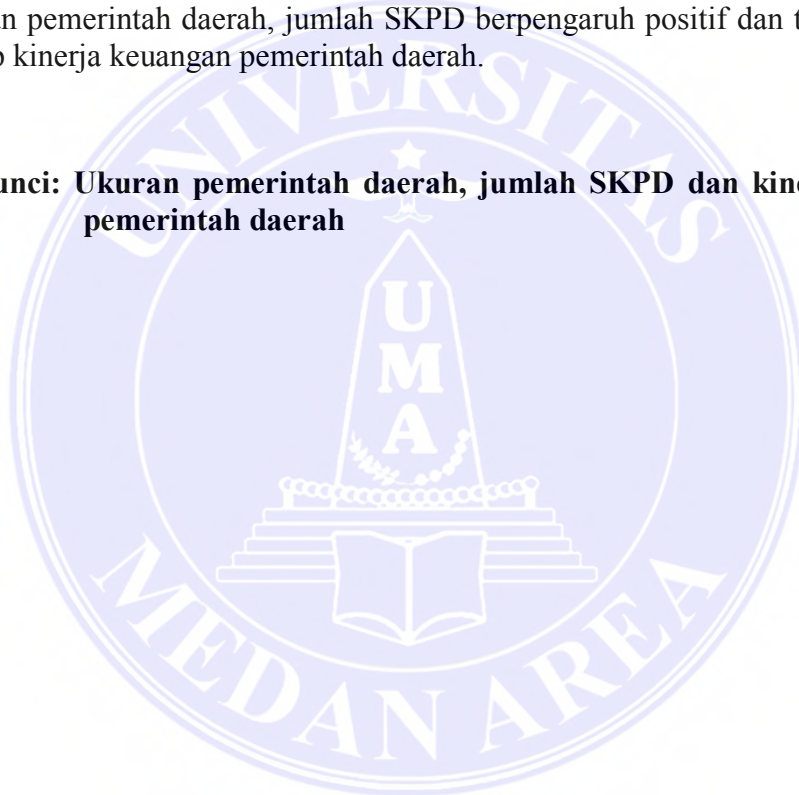
Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019  
Yang menyatakan

  
(Purnama Sitio)  
158330038

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, dan jumlah SKPD baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara tahun 2015, 2016 dan 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dan dokumentasi dari 33 LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda, dengan SPSS versi 25 hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, jumlah SKPD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci: Ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan kinerja keuangan pemerintah daerah**



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of size regional government and total SKPD both partially and simultaneously at financial performance of local government in Province North Sumatera. The type of research that is used is the quantitative method. The population in this study was the north Sumatera provincial and district LKPD in year 2015, 2016 and 2017. The type of data used in this study is secondary data. Data collection techniques used the purposive sampling and documentation method from 33 district LKPD and city of north Sumatera province. Data analysis techniques used in the study are multiple linear regression analysis, with SPSS version 25 the results of the study show that the size of the region has a positive and not significant effect on the financial performance of local.*

***Keywords : size of regional government, total SKPD and financial performance of localgovernment***



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas banyak kendala. Namun atas berkat karunia dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini terseleikan dengan baik, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Rahman, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Heri Syahrial, SE, MSi selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Busnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nst,SE,AK,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE,M.Si selaku Ketua skripsi penulis sekaligus dosen pembimbing I skripsidan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan

dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Warsani Purnama Sari, SE,Ak,MM selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE,M.Ak selaku Dosen Sekretaris skripsi yang telah meluangkan waktu dan telah banyak membantu dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
9. Terimakasih untuk Pemerintahan Wali Kota Medan yang memberikan saya izin melakukan obyek penelitian di Pemerintahan Wali Kota Medan dan para pegawai pemerintahan kota medan.
10. Sangat istimewa kedua orang tua saya tercinta, Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu penyemangat dalam hidup saya. Yang selalu sabar mendidik saya, mengarahkan saya agar menjadi anak yang berguna. Terimakasih Ayah dan Ibu telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dalam hidupku yang telah mendukung dan memberikan saya kasih sayang yang tulus dengan membimbing yang selalu mendoakan saya serta memberikan dukungan moral maupun materi sehingga saya kuliah sampai sarjana.

11. Kakak, Abang, Adek saya yang tercinta yang saya sayangi dan yang menyayangi saya yang selalu memberikan motivasi dan nasihat yang berguna, dan tidak
12. terlupakan kepada saudara-saudara saya yang mendukung saya terimakasih atas dukungan dan doanya.
13. Sahabat-sahabat saya yang kusayangi Dewi Sartika Nadeak, Tasya Grace Sihaloho, Mei Hutaso, Arini Isadora Harahap, penyemangat saya dikampus yang membantu saya dan juga yang selalu memahamiku selama ini.
14. Teman-teman akuntansi Kelas Pagi Angkatan 2015 terimakasih untuk semuanya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada saya, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan jika di dalam skripsi ini banyak kata-kata yang salah atau penyajiannya yang kurang sempurna saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua. Amin

Medan, 01 Oktober 2019

Penulis

PURNAMA SITIO

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> ... ..	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).....	6
2.2 Kinerja Keuangan pemerintah Daerah.....	11
2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah.....	14
2.3.1 Ukuran Daerah .....	14
2.3.2 Satuan Kinerja Perangkat Daerah(SKPD) .....	16
2.4 Indikator Karakteristik dan Indikator Kinerja Keuangan .....	16
2.4.1 Indikator Karakteristik .....	16
2.4.2 Indikator Kinerja Keuangan .....	17

2.5 Penelitian Terdahulu .....	17
2.6 Kerangka Konseptual .....	20
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	21
2.7.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan .....	21
2.7.2 Pengaruh jumlah SKPD Terhadap Kinerja Keuangan .....	22
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Waktu Penelitian .....	23
3.1.1 Jenis Penelitian .....	23
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	23
3.1.3 Waktu Penelitian .....	24
3.2 Populasi dan Sampel .....	24
3.2.1 Populasi .....	24
3.2.2 Sampel .....	25
3.3 Defenisi Oprasional Variabel .....	25
3.4.1 Variabel Independen .....	26
3.4.2 Variabel Dependen .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4.1 Jenis Data .....	28
3.4.2 Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	30
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	30



3.6.2.1 Uji Normalitas .....	30
3.6.2.2 Uji Autokorelasi .....	31
3.6.2.3 Uji Multikolinieritas .....	31
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	32
3.6.3 Analisis Regresi Berganda .....	32
3.6.4 Uji Hipotesis.....	34
3.6.4.2 Uji Parsial (Uji t) .....	34
3.6.3.3 Uji Simultan (Uji F).....	34
3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	34
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) .....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	37
4.2 Deskriptif Hasil Penelitian .....	38
4.3 Sampel Penelitian.....	38
4.4 Analisis Data Penelitian .....	41
4.4.1 Uji Statistik Deskriptif .....	42
4.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
4.4.2.1 Uji Normalitas.....	44
4.4.2.3 Uji Autokorelasi .....	46
4.4.2.4 Uji Multikolinieritas.....	47
4.4.2.5 Uji Heteroskedastisitas .....	48

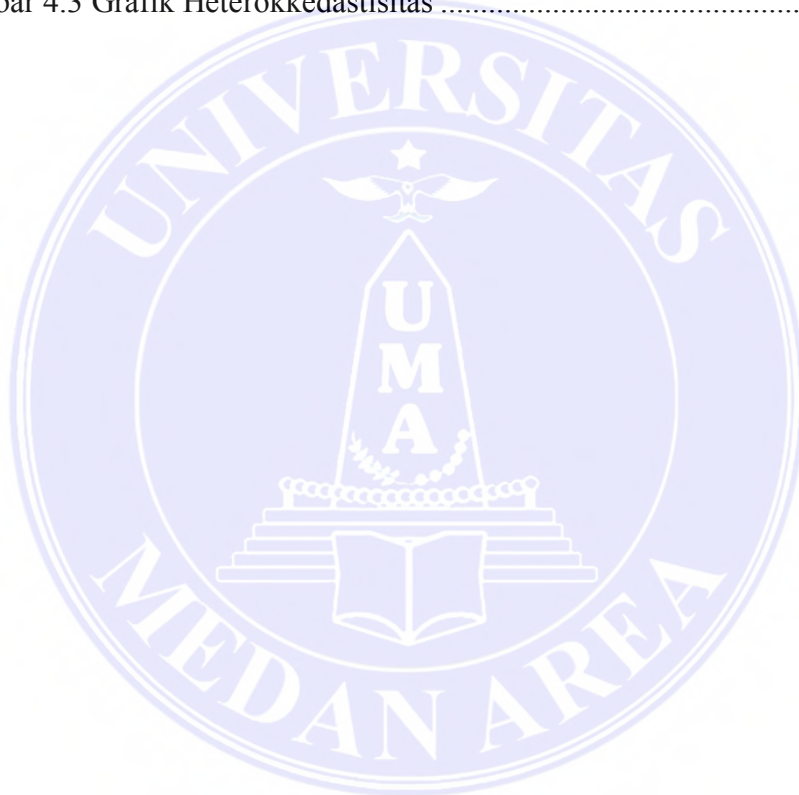
4.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	49
4.4.4 Uji Hipotesis.....	50
4.4.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	50
4.4.4.2 Uji Simultan (Uji F) .....	52
4.4.4.3 Uji Kolerasi koefesien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	53
4.5 Pembahasan.....	54
4.5.1 Pengaruhukuran (Size) pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
4.5.2 Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	55
<b>BAB V: KESIMPULAN.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran Bagi Pemerintah Daerah .....	57
5.3 Saran Bagi PenelitiSelanjutnya .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Oprasiaonal Variabel.....	26
Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel .....	33
Tabel 4.2 Asset, Jumlah SKPD, dan Efisiensi Kinerja .....	38
Tabel 4.3 Statistik Deskrtif.....	42
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	44
Tabel 4.5 Uji Autokolerasi.....	46
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t).....	50
Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F) .....	52
Tabel 4.10 Uji Kolerasi Dan Determinasi.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan .....	36
Gambar 4.2 Grafik P-Plot.....	45
Gambar 4.3 Grafik Heterokedastisitas .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1996 dan puncaknya pada tahun 1997. Penyelenggaraan keuangan daerah dapat mendorong pendelegasian sebagai wewenang pemerintah pusat dalam pelayanan atas dasar keuangan daerah sendiri dan membiayai pembangunan. Pada tahun 1998 terjadi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah membawa perubahan bagi politik dan sistem pemerintahan maupun administrasi keuangan negara yang diawali dengan perubahan system organisasi. Perubahan organisasi teknik prosedur pemerintah mengalihkan dari sentralistik ke desentralistik. Tujuan desentralisasi diindonesi adalah untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing. Pengelolaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas bantuan publik yang lebih baik. Menyiapkan infrastruktur merupakan kunci akan pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No.

22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan bertugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adi (2005) menyatakan pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintahan belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak yang terjadi kesenjangan antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidak seimbangan pembangunan pada daerah-daerah

tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintah yang baik (Halacmi, 2005).

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dimana kinerja keuangan digunakan sebagai variabel Dependen. Sedangkan penelitian karakteristik pemerintah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan dipemerintah daerah di Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah.

Penelitian yang Suhardjanto et al., (2010) menyatakan Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Ukuran pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012). Berdasarkan penelitian

Sumarjo (2010) peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik dan akuntansi sektor pemerintahan yaitu yang berkaitan dengan pengembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap periodennya guna untuk perbaikan kinerja yang dimasa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi para Akademis

Peneliti ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman yang lebih baik terutama mengenai karakteristik pemerintah daerah.

#### 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai karakteristik pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

#### 3. Pihak Masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai tujuan secara umum, Bastian (2006:) menyebutkan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya;

- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya;
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya;
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24/2005, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi, Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas

Laporan Keuangan dengan diberlakukan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami berbagai pihak terutama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dalam menjalankan tugasnya (PP No. 24/2005). Komponen yang harus disajikan dalam Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu:

#### 1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Aset tetap
- 6) Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek
- 7) Ekuitas

## 2. Laporan Realisi Anggaran

Tujuan pelaporan realisi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan Realisi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

## 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

## 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

## 5. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 6. Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Catatan Atas Pelaporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

## 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Azhar (2008),

menyatakan bahwa kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah (2007), menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2012). “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998) dalam (Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian, 2006: 275). Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam



melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012). Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya. Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) dan Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012), menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian
- b. Rasio Efektivitas
- c. Rasio Efisiensi
- d. Rasio Aktivitas
- e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
- f. Rasio Pertumbuhan

### **2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah**

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yaitu mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006). Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, jumlah SKPD, kesejahteraan functional differentiation, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, leverage daerah, dan intergovernmental revenue (Suhardjanto et al, 2010). Penelitian ini menggunakan Ukuran daerah dan Jumlah SKPD sebagai proksi dari karakteristik pemerintahan daerah.

#### **2.1.3 Ukura daerah**

Ukuran daerah adalah salah satu elemen dari struktur organisasi dan prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi Patrick (2007) dan

Suharjanto, Yulianingtyas (2011). Penelitian ini dilakukan oleh Sukirto (2007) yang menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi besar. Semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Begitu pula terhadap pemerintahan, menurut Susilawati (2016) menyatakan bahwa suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintahan daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan Ukuran daerah adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

### 2.2.3 Satuan Kenerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Pemerintah). Status kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi pada pemerintah daerah yang wajib menyajikan laporan keuangan untuk di konsolidasikan menjadi LKPD (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah). Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) merupakan bagian dari diferensial fungsional. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif termasuk nilai yang relevan.

## 2.4 Indikator Karakteristik dan Indikator Kinerja Keuangan

### 2.4.1 Indikator karakteristik

Menurut Bastian (2006) indikator karakteristik ukuran pemerintahan dan jumlah SKPD terdiri dari:

a. indikator ukuran pemerintah

1. pengukuran atau penilaian dalam keuangan
2. pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

b. indikator jumlah SKPD

1. penyusunan dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja pemerintah daerah
2. mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
3. kelengkapan informasi yang disajikan terhadap laporan keuangan.

**2.4.2 Indikator kinerja keuangan**

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Efisiensi
4. Rasio Aktivitas
5. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
6. Rasio Kemandirian

**2.5. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah mencoba memaparkan hubungan antara ukuran, dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang menggunakan alat analisis yang sama, namun memiliki hasil yang beragam. Perbedaan hasil ini tentu memberikan pandangan dan penguatan akan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh mengenai tema dan permasalahan yang ada.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Kusumawar dani, (2012)	Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: 1. ukuran(size) pemerintah 2. legislatif 3. leverage	Hasil dari penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa size dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan.	Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah Variabel independen: 1. ukuran pemerintah	Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan kemakmuran,

			daerah 2.kemakmuran 3.intergovernm ental revenue	intergovernmental revenue dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali.
3.	Sumarjo (2010)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)	Variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah Variabel independen: 1.ukuran daerah 2.ukuran legislative	Dalam penelitian ini memperoleh hasil yaitu size, leverage, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun kemakmuran dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Nur Lailatul dan Khasanah (2014)	Pengaruh karakteristik kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan	Variabel dependen: pengungkapan laporan keuangan Variabel indpenden: 1.umur pemerintah	penelitian menunjukkan bahwa dari variabel yang menggambarkan karakteristik pemerintah daerah, hanya total asset yang berpengaruh positif

		laporan keuangan pemerintah daerah	2.jumlah SKPD 3.kekayaan 4.tingkat ketergantungan	dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan variabel lain berupa kekayaan daerah(PAD), Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh secara signifikan. Sementara dari kompleksitas pemerintah, hanya variabel jumlah SKPD yang memiliki pengaruh.
--	--	------------------------------------	---	--

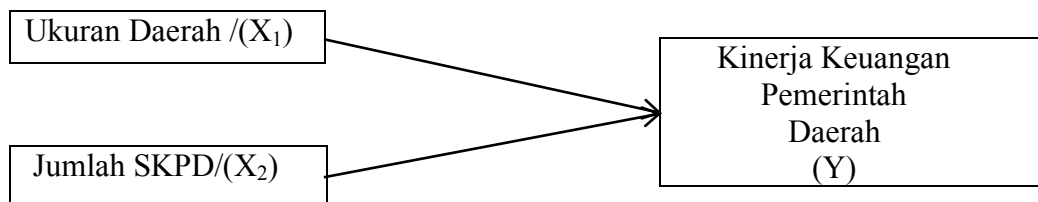
## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah diprosikan kedalam ukuran pemerintah dan jumlah SKPD. Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 2.1

## Kerangka Konseptual



## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran daerah dan jumlah SKPD. Berikut ini adalah pengembangan hipotesis untuk masing-masing karakteristik pemerintah daerah.

### 2.7.1 Pengaruh ukuran pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyani (2012) serta Kusumawardani (2012) bahwa ukuran Pemda berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara.

### **2.6.2 Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merepresentasikan diferensiasi fungsional di pemerintahan daerah. SKPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain dari itu SKPD merupakan suatu sarana dalam berbagai ide, informasi, dan inovasi. Didalam sebuah pemerintahan daerah jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja keuangan SKPD semakin baik pula (Patrick, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian (Damanpour, 2007) yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD (functional differentiation) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis.

$H_2$  : terdapat pengaruh positif jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, (2011) “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”.

Menurut Siregar, (2013) “penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memperlumuskan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti kebenaran, memperoleh jawaban atau masalah, pengembangan ilmu sampel tertentu.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat pelaksanaan suatu penelitian. penelitian dilakukan pada kantor BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 22, Masdras Hulu, Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara.

### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2019 sampai dengan selesai dengan rincian waktu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2019							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Pembuatan Proposal	■	■						
2.	Seminar Proposal			■					
3.	Pengumpulan Data				■	■	■		
4.	Analisis Data						■		
5.	Penyusunan Skripsi							■	
6.	Seminar Hasil							■	
7.	Pengajuan Sidang								■

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Menurut Sekaran (2006), populasi dapat dijelaskan sebagai kumpulan atau kelompok orang, peristiwa atau sesuatu yang menarik minat peneliti untuk

melakukan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah LKPD pemerintahan daerah Provinsi Sumatera utara.

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi (Sekaran, 2006). Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Jogiyanto, 2005). Adapun kriteria sampel sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Pada sampel tersebut, menyediakan jumlah SKPD kabupaten dan kota Provinsi Sumatera utara.
3. Sampel dalam penelitian adalah 33 LKPD kabupaten dan kota tahun 2015, 2016 dan 2017

### 3.3 Defenisi Oprasional Variabel

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/ objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu, variabel independen dan variabel

dependen. Ada pun pengukuran dan defenisi masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen(Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel idependen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik berpengaruh secara positif maupun negatif (sekaran, 2006). Dalam penelitan ini yang menjadi variabel independen yaitu ukuran pemerintahan dan jumlah SKPD pada pemerintah daerah provinsi sumatera utara. Oprasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Oprasiaonal Variabel**

<b>Variabe l</b>	<b>Devenisi oprasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skal a uku r</b>
Ukuran Pemerintahan(x)	Suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecilnya pemerintahan.Ukuran pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan total asset, jumlah pendapatan, jumlah karyawan dan tingkat produksi(Damanpour,2008).Penelitian ini menggunakan total asset pemerintahan	1).pengukur an atau penilaian dalam keuangan 2).pengambi lan	R A S I O

	<p>daaaerah. Total asset suatu daerah dalam penelitian ini merupakan log dari asset yang terdiri asset tetap maupun asset lancar.</p> $\text{Asset} = \text{Total Asset}$	keputusan dan akuntabilitas	
Jumlah SKPD	<p>Fungsi yang dilaksanakan SKPD berdasarkan objek penyelenggaraanya, yaitu pelaksanaan fungsi yang berkaian dengan penyusunan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Pengukuran jumlah SKPD dalam penelitian ini menggunakan total seluruh SKPD pemerintahan daerah .</p> $\text{SKPD} = \text{Total SKPD}$	<p>1).Penyusunsn yang dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kinerja pemerintah daerah</p> <p>2).mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan</p> <p>3.kelengkapan informasi yang disajikan terhadap laporan keuangan</p>	<p>I N T E G R A T I O N</p>

Kinerja keuangan (Y)	Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003). Perhitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hamzah, 2009). Proksi kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Maiyora, 2015) karena efisiensi merupakan rasio yang umum dan banyak digunakan dalam penelitian.  $\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}}$	1). Rasio Kemandirian 2). Rasio Efektivitas 3). Rasio Efisiensi 4). Rasio Aktivitas 5). <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) 6). Rasio Kemandirian	R A S I O
----------------------	---	--	-----------------------

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008).



### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiono (2005) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan kepada peneliti. Misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan stufi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu penelitian mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dari LKPD kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara langsung melalui dokumen yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang meliputi analisis regresi berganda, determinasi, simultan dan T-test. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan dengan program SPSS 25.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan distribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 10%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian ini adalah apabila p value > 0,5 maka data

berdistribusi secara normal, sedangkan apabila  $p \text{ value} < 0,5$  data tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung juga dengan normal probability plot.

### 3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Tujuan dari dilakukan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110). Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model terdapat autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan alat uji Runs Test. Kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan uji statistik Runs Test menurut Ghozali, (2011: 111) yaitu :

- a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti terjadi gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

### 3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol) (Ghozali, 2011 : 105). Untuk mengukur multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independenlainnya. Jika nilai tolerance $\leq 0,1$  dan VIF $\geq 10$ , mengartikan bahwa data tersebut terjadi multikolinearitas. Jika nilai tolerance $\geq 0,1$  dan VIF $\leq 10$ , dapat diartikan tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian tersebut (Ghozali, (2011: 106).

#### **3.6.2.4 Uji Heterokkedastisitas**

Uji Heterokkedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Artinya, Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### **3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Penggunaan model regresi berganda (multiple regression analysis) dipilih karena variabel ini terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen (Sekaran, 2006). Menurut, Sugiono (2011) analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Untuk melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003).

Perhitungan regresi berganda dinyatakan dalam persamaan :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien ukuran daerah

$b_2$  = Koefisien Jumlah satuan kerja perangkat daerah

$X_1$  = Ukuran daerah

$X_2$  = Jumlah satuan kerja perangkat daerah

e = Standart error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gozali, 2013). Cara untuk mengetahuinya apakah signifikan atau tidak terhadap variabel dependen maka digunakan signifikan level sebesar 0.05. jika nilai signifikan (p value) > 0,5 maka secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, bila signifikan (p value) > 0,5 maka secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.4.2 Pengujian Simultan (F)

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95 %.

$$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0 \text{ ditolak}$$

$$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0 \text{ diterima}$$

#### 3.6.4.3 Pengujian Koefisien Derterminasi (Adjusted R2)

Untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh antara variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Jika ( $R^2$ ) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) adalah besar terhadap variabel

depenenden (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika ( $R^2$ ) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen semakin kecil.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. perwakilan BPK RI beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 22, Masdras Hulu, Medan Polonia, kota Medan, Sumatera Utara.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Badan Pemriksaan Keuangan(BPK)**

###### **1. Visi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)**

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

###### **2. Misi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)**

- a). Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- b). Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan tanggung

jawab keuangan negara



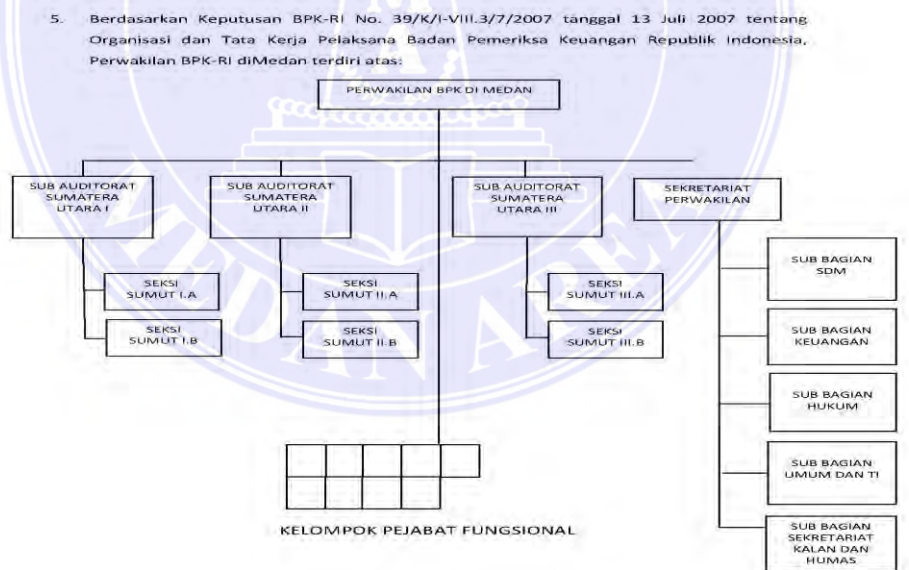
- c). Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam suatu susunan hirarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dalam stuktur organisasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

#### Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



## 4.2 Deskriptif Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten dan kota provinsi sumatera utara tahun 2015, 2016 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten dan kota yang terdapat pada provinsi sumut yang terdiri dari 28 kabupaten dan 8 kota. Penelitian ini menggunakan data tahun 2015, 2016 dan 2017 karena didasarkan pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang *up to date* sehingga bisa menggambarkan kondisi laporan keuangan pemerintah daerah terkini. Tabel 4.1 dibawah ini menyajikan pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.1**

**Tabel Proses Pengambilan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Pemerintah kabupaten dan kota provinsi sumatera utara 2015, 2016 dan 2017	33
Laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota provinsi sumatera utara 2015, 2016 dan 2017	3
Total pengambilan sampel	99

### 4.2.1 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2015, 2016 dan 2017 yang telah diaudit oleh

BPK serta memiliki ketersediaan data yang lengkap setiap tahunnya. Data tahunan yang diperoleh yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan jumlah SKPD. Berikut hasil data penelitian terhadap asset, jumlah SKPD dan efisiensi kinerja keuangan.

**Tabel 4.2**

**Asset, Jumlah SKPD, dan Efisiensi Kinerja**

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Asset(Rp)	Jumlah SKPD	Kinerja keuangan (%)
1	Kab.Asahan	2015	3.070.087.169.481	21	0.871609905
		2016	3.230.743.738.941	21	0.44307987
		2017	3.257.232.990.543	21	0.58801465
2	kab.batu bara	2015	1.208.225.250.939	11	0.778733176
		2016	1.634.983.178.863	11	0.464208568
		2017	1.953.901.338.959	11	0.507693124
3	kab.dairi	2015	1.697.871.314.268	27	0.847131971
		2016	1.862.736.799.468	27	0.629863922
		2017	1.912.571.435.170	27	0.540672888
4	kab.deli serdang	2015	4.659.732.843.054	21	0.439862732
		2016	6.152.368.379.435	21	0.48417151
		2017	6.830.055.237.857	21	0.491285947
5	kab.humbang hansudutan	2015	1.543.303.952.725	16	0.463904428
		2016	1.744.282.122.538	16	0.449947516
		2017	1.725.640.557.780	16	0.482262191
6	kab.karo	2015	1.890.653.365.765	11	0.505684398
		2016	1.921.654.852.059	11	0.608152519
		2017	2.282.955.372.592	11	0.665852448
7	kab.labuhan batu	2015	2.190.772.786.348	13	0.505576251
		2016	2.501.444.360.858	13	0.456389907
		2017	2.500.309.000.870	13	0.769133964
8	kab.labuhan batu selatan	2015	1.013.394.220.215	23	0.467010092
		2016	1.176.711.936.981	23	0.474364085
		2017	1.196.845.479.711	23	0.481308027
9	kab. labuhan batu utara	2015	2.207.715.943.933	32	0.336661204
		2016	2.188.698.815.512	32	0.330352138
		2017	2.373.700.486.908	32	0.443507959
10	kab.langkat	2015	2.830.460.798.519	12	0.53731432
		2016	3.406.752.831.891	12	0.438885794
		2017	2.830.460.798.519	12	0.479792646

11	kab.mandailin g natal	2015	1.253.689.163.699	12	0.600503294
		2016	1.970.863.374.638	12	0.445225803
		2017	1.817.530.352.612	12	0.479723726
12	kab.nias	2015	1.362.426.016.984	16	0.422775352
		2016	1.498.497.455.141	16	0.518613612
		2017	1.601.534.275.367	16	0.460324256
13	kab.nias barat	2015	649.590.088.448	10	0.474118403
		2016	794.261.576.021	10	0.424570048
		2017	955.244.198.893	10	0.48172026
14	kab.nias selatan	2015	1.490.811.288.765	12	0.417669445
		2016	1.493.386.650.705	12	0.593608868
		2017	1.547.876.111.943	12	0.674971933
15	kab.nias utara	2015	958.403.717.018	16	0.342007255
		2016	1.422.080.957.433	16	0.546112319
		2017	1.649.128.696.546	16	0.516681954
16	kab.padang lawas	2015	1.367.847.931.183	29	0.65267462
		2016	1.273.064.700.908	29	0.486920577
		2017	1.332.727.214.237	29	0.603195185
17	kab.padang lawas utara	2015	1.069.645.031.668	30	0.589869404
		2016	1.181.750.931.335	30	0.43125916
		2017	1.291.843.474.045	30	0.634400697
18	kab.pakpak bharat	2015	849.891.874.310	25	0.457296642
		2016	912.481.989.844	25	0.651728745
		2017	916.547.952.787	25	0.465793565
19	kab.samosir	2015	1.262.107.078.913	10	0.46107753
		2016	1.593.266.053.881	10	0.42528907
		2017	1.477.140.679.705	10	0.413041285
20	kab.serdang begadai	2015	1.223.700.739.949	11	0.510030656
		2016	1.761.364.481.265	11	0.441092133
		2017	1.828.864.944.591	11	0.486105175
21	kab.simalungu n	2015	2.773.651.761.566	21	0.417412483
		2016	3.028.693.942.918	21	0.420799343
		2017	3.061.935.914.469	21	0.512308082
22	kab.tapanuli selatan	2015	1.741.870.850.744	15	0.542500426
		2016	1.789.394.962.256	15	0.439781843
		2017	1.947.961.698.352	15	0.602522683
23	kab.tapanuli tengah	2015	1.161.775.798.454	17	0.422827855
		2016	1.206.574.834.404	17	0.76848268
		2017	1.221.090.796.655	17	0.572530024
24	kab.tapanuli utara	2015	341.872.401.351	28	0.554966484
		2016	2.008.985.435.220	28	0.461916494
		2017	1.887.854.571.200	28	0.423881926

25	kab.toba samosir	2015	1.521.423.381.803	23	0.495226962
		2016	1.593.266.053.881	23	0.439987001
		2017	1.477.140.679.705	23	0.649583158
26	kota binjai	2015	1.315.764.837.539	26	0.423009341
		2016	1.094.699.530.587	26	0.538099804
		2017	1.091.763.938.817	26	0.488814387
27	kota gunungsitoli	2015	1.331.445.520.776	32	0.542448223
		2016	1.321.384.031.522	32	0.488833192
		2017	1.303.844.084.370	32	0.426937545
28	kota medan	2015	29.940.354.805.687	25	0.543554731
		2016	29.958.683.673.011	25	0.514636547
		2017	30.527.773.136.028	25	0.501974925
29	kota p.sidempuan	2015	922.779.404.741	36	0.492334271
		2016	1.146.652.789.323	36	0.685858577
		2017	1.219.398.699.868	36	0.418943573
30	kota pematangsiant ar	2015	4.927.232.762.368	36	0.547975146
		2016	2.946.216.853.168	36	0.413258699
		2017	2.960.783.917.911	36	0.496944503
31	kota sibolga	2015	1.724.268.747.536	20	0.566308993
		2016	1.465.138.453.120	20	0.587412121
		2017	1.361.600.412.154	20	0.516634481
32	kota tanjungbalai	2015	1.115.346.240.600	45	0.459134031
		2016	1.271.940.346.895	45	0.471663156
		2017	1.485.552.202.047	45	0.560571235
33	kota tebing tinggi	2015	1.442.229.736.501	31	0.446653428
		2016	1.524.810.502.227	31	0.498258204
		2017	1.689.059.696.131	31	0.439254884

### 4.3 Analisis Data Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variable independen (Karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan ukuran daerah dan jumlah SKPD) terhadap variable dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib LKPD.

### 4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, maka berikut di dalam table 4.2 ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sampel(mean) serta standart deviasi untuk masing-masing variable.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ASSET	99	27.20	31.05	28.2311	.65366
SKPD	99	10.00	45.00	21.6061	8.96913
KINERJA	99	3.45	63.69	27.9637	10.47022
Valid N (listwise)	99				

Sumber : output SPSS

Berdasarkan pada table 4.2 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumut rata-rata sebesar 28,2. Nilai rerata sebesar 28,2 menandakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera utara tergolong kurang memiliki kinerja yang kurang efisien. Penelitian yang dilakukan Minarsih (2015) mengungkapkan apabila pemerintah daerah yang memiliki persentase Pemerintah daerah dikatakan efisien jika memiliki persentase sebesar 60-80. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sumut belum membelanjakan dana yang ada sesuai dengan yang anggarankan serta masih buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan, pemerintah daerah provinsi Sumatera utara belum dapat mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan sampel yang ada maka didapatkan bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki kinerja dibawah rata-rata dan kinerja diatas rata-rata. Tingkat efisiensi nilai terendah sebesar 34,5% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut belum dapat mengelola pemerintahannya dengan baik atau tidak dapat menggunakan anggaran yang ada secara semestinya serta masih buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nilai efisiensi tertinggi pemerintah daerah sebesar 63,69%. Jika nilai efisiensi tinggi maka pemerintah daerah telah menggunakan dana sesuai yang dianggarkan.

Penelitian ini menggunakan total aset dalam mengukur ukuran pemerintah. Dilihat dari sisi ukuran pemerintah, pemerintah daerah di Sumatera Utara memiliki total aset rata-rata Rp. 2.823.110.000.000. Total aset terendah sebesar Rp. 272.000.000.000 dan total aset tertinggi sebesar Rp. 31.527.773.136.028

Satuan perangkat kinerja daerah (SKPD) diukur menggunakan total SKPD hasil statistik deskriptif terhadap jumlah SKPD dari 99 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah SKPD kabupaten dan kota di Sumatera Utara adalah 21,60 satuan kinerja. Jumlah SKPD terbanyak terdapat di Kota Tanjung Balai, sedangkan jumlah SKPD terendah ada di Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Karo.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan distribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 10%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian ini adalah apabila p value  $> 0,5$  maka data berdistribusi secara normal, sedangkan apabila p value  $< 0,5$  data tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung juga dengan normal probability plot. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**

#### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.8128658
Most Extreme Differences	Absolute	0
	Positive	.104
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.236

a. Test distribution is Normal.

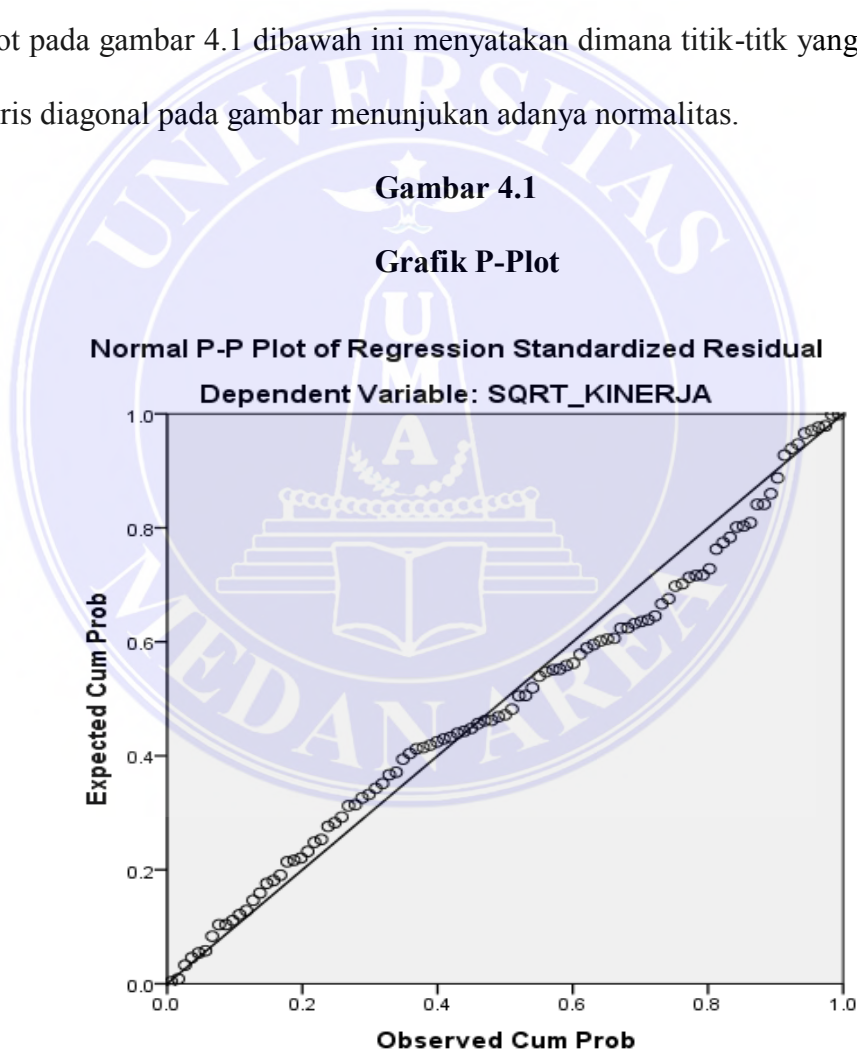
b. Calculated from data.

Sumber : output SPSS



Hasil uji normalitas seperti tersaji di atas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0,236 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

Demikian juga pada hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot pada gambar 4.1 dibawah ini menyatakan dimana titik-titik yang mengikuti garis diagonal pada gambar menunjukkan adanya normalitas.



**Sumber : output**

### 4.3.2.3 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Run Test. Kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan uji statistik Rusn Test menurut Ghozali, (2011: 111) yaitu :

- a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti terjadi gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi penelitian.

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Autokolerasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.73964
Cases < Test Value	49
Cases $\geq$ Test Value	50
Total Cases	99
Number of Runs	50
Z	-.100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.920

a. Median

Sumber : output SPSS

Hasil uji autokorelasi dengan Runs Test di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,920 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala autokolerasi dalam model penelitian.

#### 4.3.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) dengan kriteria, jika nilai tolerance  $\leq 0,1$  dan VIF  $\geq 10$  maka terjadi multikolinieritas dan jika nilai tolerance  $\geq 0,1$  atau VIF  $\leq 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

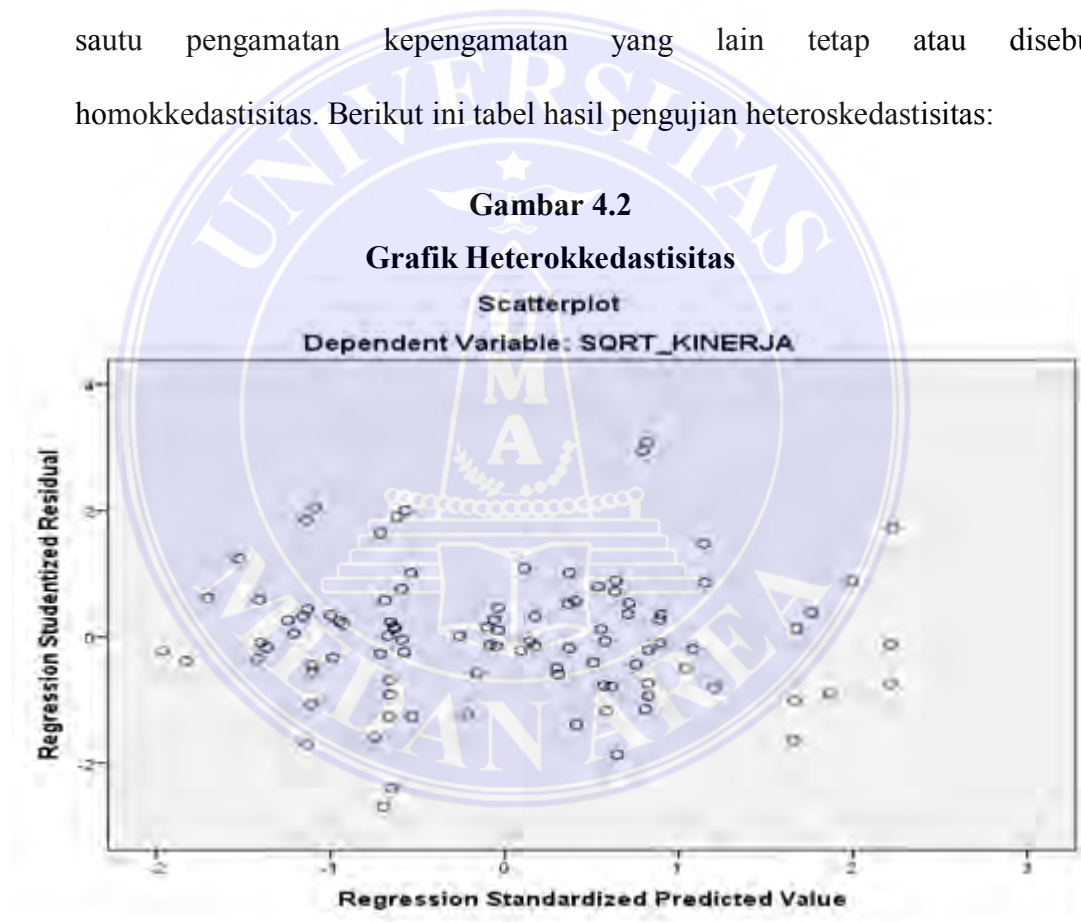
Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	69.330	43.292			
ASSET	-1.763	1.533	-.110	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel yaitu sebesar 1,000 dimana dalam tiap model regresi lebih besar dari 0,1. Begitu juga dengan nilai VIF untuk semua variable yaitu sebesar 1,000 dimana dalam tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.3.2.5 Uji Heterokkedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode scatter plot. Uji heterokkedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan kepengamatan lainnya (Lubis dan Osman, 2015). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap atau disebut homokkedastisitas. Berikut ini tabel hasil pengujian heteroskedastisitas:



Sumber : output SPSS

Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil uji heterokkedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot pada gambar 4.2 diatas ini menyatakan, tidak terdapat pola tertentu pada grafik dan titik-titik menyebar dan melebar, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heterokkedastisitas.

### 4.3.3 Analisis Regresi Berganda

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran pemerintah (*size*), dan jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk tujuan penelitian tersebut, maka dalam melakukan analisis data penelitian dengan menggunakan model regresi berganda. Berikut hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20:

**Tabel 4.5**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
	(Constant)	69.330	43.292				
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 69,330 Dari hasil analisi regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 69,33 + 1,763X + 0,389X + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa table 4.5 menunjukkan bahwa:

- a. Konstanta (a) sebesar 69,33 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen (ukuran pemerintahan daerah dan jumlah SKPD) bernilai nol atau ditiadakan, maka nilai kinerja sebesar 69,33.
- b. Koefesien regresi X1 (b1) sebesar 1,763. Artinya ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan Ukuran Pemerintahan sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan nilai Kinerja sebesar 1,763.
- c. Koefesien regresi X2 (b2) sebesar 0,389. Artinya ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan Jumlah SKPD sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh pengurangan nilai Kinerja sebesar 0,389.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

##### 4.3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yang ditentukan dengan menggunakan tabel *coefficients*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69.330	43.292		1.601	.113
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : output SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh  $t$  hitung sebesar -1,150 ( $df = n - k - 1 = 96$ ) ( $\alpha/2 = 0,5/2 = 0,025$ ). Dimana  $df$  a *degree of freedom* atau derajat bebas  $n =$  jumlah data; dan  $k =$  jumlah variabel dengan  $\alpha = 0,05$ .

1. Pada variabel ukuran daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.150 dan signifikansinya sebesar 0,253. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98498 maka,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikannya  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel ukuran daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pada variabel SKPD diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.484 dan signifikannya sebesar 0,001. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98498 maka,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikannya  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk melihat secara bersama-sama (simultan) pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji secara simultan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.7.

**Tabel 4.7**

#### Uji Simultan (Uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1306.650	2	653.325	6.646	.002 <sup>b</sup>
	Residual	9436.649	96	98.298		
	Total	10743.299	98			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), SKPD, ASSET

Sumber : output SPSS

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  hipotesis diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 6,646 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 (df 1=2; df 2=n-k-1=96), dimana “k” adalah jumlah variabel independen sementara “n” adalah jumlah sampel penelitian, dapat dilihat nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan  $0,002 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



#### 4.3.4.3 Uji Kolerasi (R) dan koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien kolerasi (R) menjelaskan tingkat hubungan antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). sedangkan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Kolerasi Dan Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 <sup>a</sup>	.322	.203	9.91456

a. Predictors: (Constant), SKPD, ASSET

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : output SPSS

berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, dapat dilihat dari *Adjusted Square* dan nilai yang diperoleh adalah 0,203 atau 20,3% digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara ukuran daerah dan jumlah SKPD terhadap kinerja. Dengan kata lain, variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian ini mampu menjelaskan variasi pada terikatnya sebesar 20,3 % Sedangkan 79,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar dari persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ukuran pemerintahan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti menduga bahwa terlalu besarnya jumlah aset daerah menyulitkan peran pemerintah untuk dapat memonitor masing-masing aset tersebut secara langsung. Kesulitan dalam pengawasan ini memungkinkan terjadinya berbagai tindak penyalahgunaan atas aset tersebut, sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera utara.

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah

yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

#### **4.4.2 Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa jumlah SKPD (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) yang menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa didalam sebuah pemerintahan daerah jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja SKPD semakin baik pula (Patrick, 2007). Berdasarkan peraturan PP. No 24 tahun 2005 tentang standart akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Tetapi dalam pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi sumatera utara SKPD tidak menjalankan agaran yang sesuai yang telah dianggarkan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera utara.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda dengan program SPSS. Data sampel sebanyak 99 LKPD kabupaten dan kota provinsi sumatera utara yang diaudit oleh BPK.

Dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di sumatera utara pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total asset dimana ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan lebih memiliki tekanan yang lebih besar untuk melakukan transparansi atas laporan keuangannya.

2. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan dalam variabel bebas dimana Jumlah SKPD diukur dengan menggunakan seluruh total SKPD. Jumlah SKPD dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak SKPD dalam suatu pemerintahan daerah maka semakin dapat terlihat hasil kinerja keuangan dalam suatu pemerintahan.

## **5.2 Saran Bagi Pemerintah Daerah**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien, maka diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.

## **5.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan laporan keuangan yang terbaru yang telah diaudit oleh BPK sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik lagi. Peneliti juga merekomendasikan untuk menambahkan variabel-variabel lain selain yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. *Perilaku Opertunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Pendekatan Principal-Agency Theory*: Bengkulu
- Azhar, M. 2008. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah*. Jurnal Universitas Sumatera Utara
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*: Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Suatu Penganta*: Jakarta
- Garini, A. 2015. *Pengaruh belanja daerah, temuan audit dan size terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintahdaerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Sukarela dalam Laporan Tahunan: Surakarta
- Herminingsih, 2006. *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)*: Semarang
- Indrawan, Y. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin.
- Jogiyanto. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*: Yogyakarta.
- Kusumawardani, M. 2012. *Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* : Yogyakarta.
- Mustikarini, W. A., Fitriasari, D. 2012. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaen/kota di Indonesia tahun anggaran 2007*. *Simposium Nasional*: Banjarmasin
- Naim, A., dan F. Rakhman. 2007. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe*

- Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia: Jakarta*
- Patton, T. K., and D. R. Bean. 2001. *The why and how of the new capital asset reporting requirements. Public Budgeting and Finance: Jakarta*
- Peraturan Pemerintah, 2005. *Standart Akuntansi Pemerintahan.: Jakarta*
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga: Jakarta
- Retnoningsih, H. 2009. *Influence of Parliament Characteristics Disclosure Compliance in Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta: Surakarta
- Renas, Dul Muid. 2009. *Pengaruh Karakteristik Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro: Bandung
- Rochmah, S. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sigit Indra, L. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi: Surakarta
- Suryo Sakti, H. 2010. *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewewenangannya*. Graha Ilmu: Jakarta
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristick: Evidence from Indonesia Municipalities*.
- Sucahyu, H. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surepno. (2013). *Pengaruh return on equity (ROE), ukuran (Size) dan kemakmuran (Wealth) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia* : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang







UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ASSET	99	27.20	31.05	28.2311	.65366
SKPD	99	10.00	45.00	21.6061	8.96913
KINERJA	99	3.45	63.69	27.9637	10.47022
Valid N (listwise)	99				

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.8128658
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.236

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

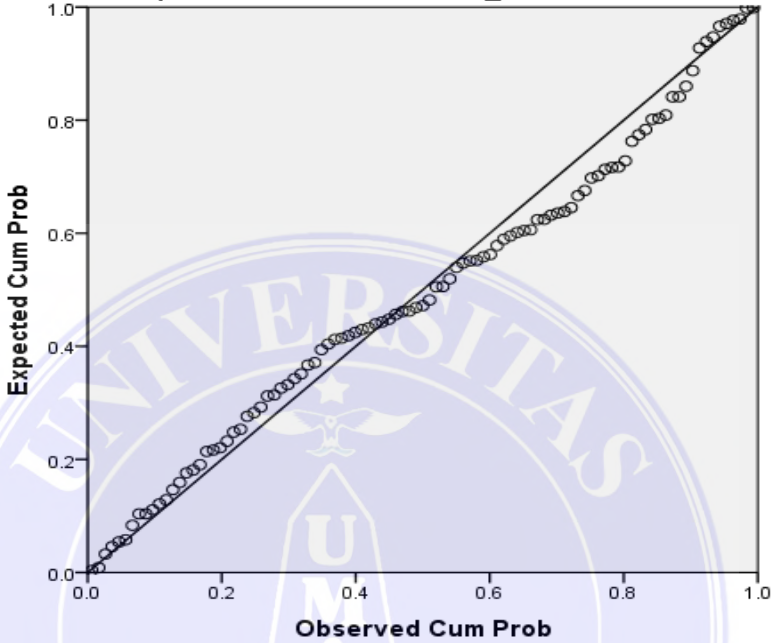
Sumber : output SPSS

**Gambar 4.1**

**Grafik P-Plot**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: SQRT\_KINERJA**



**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Autokolerasi**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.73964
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	50
Total Cases	99
Number of Runs	50
Z	-.100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.920

a. Median

Sumber : output SPSS

Tabel 4.5

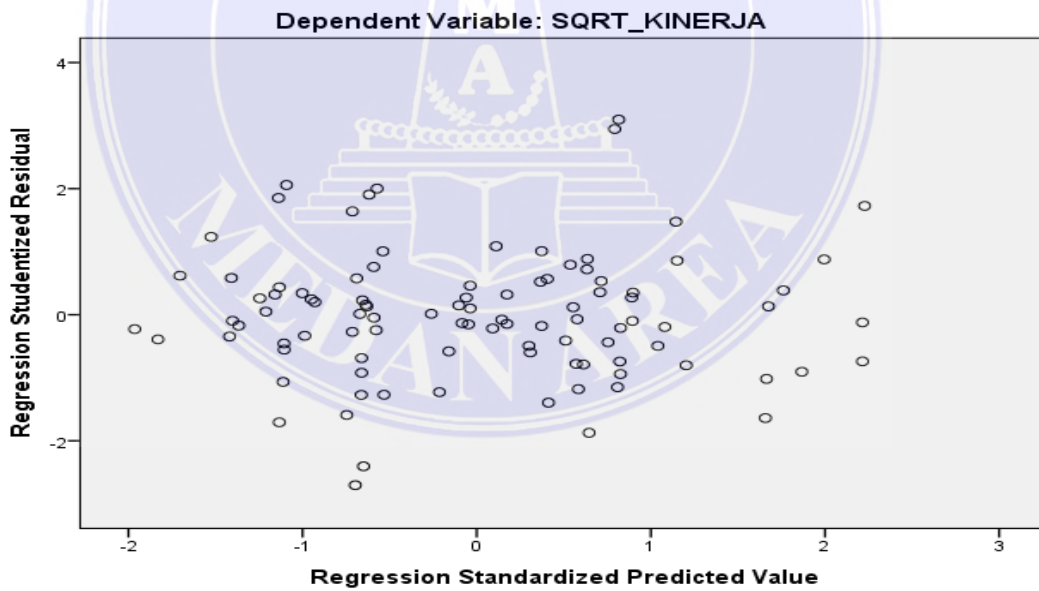
Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	69.330	43.292			
ASSET	-1.763	1.533	-.110	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
 Sumber : output SPSS

**Gambar 4.2**  
**Grafik Heterokedastisitas**  
**Scatterplot**



**Tabel 4.5**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	69.330	43.292		1.601	.113		
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253	1.000	1.000
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69.330	43.292		1.601	.113
ASSET	-1.763	1.533	-.110	-1.150	.253
SKPD	.389	.112	.333	3.484	.001

a. Dependent Variable: KINERJA  
Sumber : output SPSS

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.062	2	.031	3.324	.724 <sup>b</sup>
	Residual	9.107	96	.095		
	Total	9.169	98			

a. Dependent Variable: SQRT\_KINERJA

b. Predictors: (Constant), SQRT\_SKPD, SQRT\_ASSET

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Kolerasi Dan Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 <sup>a</sup>	.322	.203	9.91456

a. Predictors: (Constant), SKPD, ASSET

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : output SPSS

**Tabel 4.2**  
**Asset, Jumlah SKPD, dan Efisiensi Kinerja**

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Asset(Rp)	Jumlah SKPD	Kinerja keuangan (%)
1	Kab.Asahan	2015	3.070.087.169.481	21	0.871609905
		2016	3.230.743.738.941	21	0.44307987
		2017	3.257.232.990.543	21	0.58801465
2	kab.batu bara	2015	1.208.225.250.939	11	0.778733176
		2016	1.634.983.178.863	11	0.464208568
		2017	1.953.901.338.959	11	0.507693124

3	kab.dairi	2015	1.697.871.314.268	27	0.847131971
		2016	1.862.736.799.468	27	0.629863922
		2017	1.912.571.435.170	27	0.540672888
4	kab.deli serdang	2015	4.659.732.843.054	21	0.439862732
		2016	6.152.368.379.435	21	0.48417151
		2017	6.830.055.237.857	21	0.491285947
5	kab.humbang hansundutan	2015	1.543.303.952.725	16	0.463904428
		2016	1.744.282.122.538	16	0.449947516
		2017	1.725.640.557.780	16	0.482262191
6	kab.karo	2015	1.890.653.365.765	11	0.505684398
		2016	1.921.654.852.059	11	0.608152519
		2017	2.282.955.372.592	11	0.665852448
7	kab.labuhan batu	2015	2.190.772.786.348	13	0.505576251
		2016	2.501.444.360.858	13	0.456389907
		2017	2.500.309.000.870	13	0.769133964
8	kab.labuhan batu selatan	2015	1.013.394.220.215	23	0.467010092
		2016	1.176.711.936.981	23	0.474364085
		2017	1.196.845.479.711	23	0.481308027
9	kab.labuhan batu utara	2015	2.207.715.943.933	32	0.336661204
		2016	2.188.698.815.512	32	0.330352138
		2017	2.373.700.486.908	32	0.443507959
10	kab.langkat	2015	2.830.460.798.519	12	0.53731432
		2016	3.406.752.831.891	12	0.438885794
		2017	2.830.460.798.519	12	0.479792646
11	kab.mandailing natal	2015	1.253.689.163.699	12	0.600503294
		2016	1.970.863.374.638	12	0.445225803
		2017	1.817.530.352.612	12	0.479723726
12	kab.nias	2015	1.362.426.016.984	16	0.422775352
		2016	1.498.497.455.141	16	0.518613612
		2017	1.601.534.275.367	16	0.460324256
13	kab.nias barat	2015	649.590.088.448	10	0.474118403
		2016	794.261.576.021	10	0.424570048
		2017	955.244.198.893	10	0.48172026
14	kab.nias selatan	2015	1.490.811.288.765	12	0.417669445
		2016	1.493.386.650.705	12	0.593608868
		2017	1.547.876.111.943	12	0.674971933
15	kab.nias utara	2015	958.403.717.018	16	0.342007255
		2016	1.422.080.957.433	16	0.546112319
		2017	1.649.128.696.546	16	0.516681954
16	kab.padang lawas	2015	1.367.847.931.183	29	0.65267462
		2016	1.273.064.700.908	29	0.486920577
		2017	1.332.727.214.237	29	0.603195185

17	kab.padang lawas utara	2015	1.069.645.031.668	30	0.589869404
		2016	1.181.750.931.335	30	0.43125916
		2017	1.291.843.474.045	30	0.634400697
18	kab.pakpak bharat	2015	849.891.874.310	25	0.457296642
		2016	912.481.989.844	25	0.651728745
		2017	916.547.952.787	25	0.465793565
19	kab.samosir	2015	1.262.107.078.913	10	0.46107753
		2016	1.593.266.053.881	10	0.42528907
		2017	1.477.140.679.705	10	0.413041285
20	kab.serdang begadai	2015	1.223.700.739.949	11	0.510030656
		2016	1.761.364.481.265	11	0.441092133
		2017	1.828.864.944.591	11	0.486105175
21	kab.simalungu n	2015	2.773.651.761.566	21	0.417412483
		2016	3.028.693.942.918	21	0.420799343
		2017	3.061.935.914.469	21	0.512308082
22	kab.tapanuli selatan	2015	1.741.870.850.744	15	0.542500426
		2016	1.789.394.962.256	15	0.439781843
		2017	1.947.961.698.352	15	0.602522683
23	kab.tapanuli tengah	2015	1.161.775.798.454	17	0.422827855
		2016	1.206.574.834.404	17	0.76848268
		2017	1.221.090.796.655	17	0.572530024
24	kab.tapanuli utara	2015	341.872.401.351	28	0.554966484
		2016	2.008.985.435.220	28	0.461916494
		2017	1.887.854.571.200	28	0.423881926
25	kab.toba samosir	2015	1.521.423.381.803	23	0.495226962
		2016	1.593.266.053.881	23	0.439987001
		2017	1.477.140.679.705	23	0.649583158
26	kota binjai	2015	1.315.764.837.539	26	0.423009341
		2016	1.094.699.530.587	26	0.538099804
		2017	1.091.763.938.817	26	0.488814387
27	kota gunungsitoli	2015	1.331.445.520.776	32	0.542448223
		2016	1.321.384.031.522	32	0.488833192
		2017	1.303.844.084.370	32	0.426937545
28	kota medan	2015	29.940.354.805.687	25	0.543554731
		2016	29.958.683.673.011	25	0.514636547
		2017	30.527.773.136.028	25	0.501974925
29	kota p.sidempuan	2015	922.779.404.741	36	0.492334271
		2016	1.146.652.789.323	36	0.685858577
		2017	1.219.398.699.868	36	0.418943573
30	kota pematangsiant ar	2015	4.927.232.762.368	36	0.547975146
		2016	2.946.216.853.168	36	0.413258699
		2017	2.960.783.917.911	36	0.496944503



31	kota sibolga	2015	1.724.268.747.536	20	0.566308993
		2016	1.465.138.453.120	20	0.587412121
		2017	1.361.600.412.154	20	0.516634481
32	kota tanjungbalai	2015	1.115.346.240.600	45	0.459134031
		2016	1.271.940.346.895	45	0.471663156
		2017	1.485.552.202.047	45	0.560571235
33	kota tebing tinggi	2015	1.442.229.736.501	31	0.446653428
		2016	1.524.810.502.227	31	0.498258204
		2017	1.689.059.696.131	31	0.439254884



**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2015**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 1,711,309,726,472	Rp 1,963,389,490,120	0.871609905
KAB. BATU BARA	Rp 715,580,912,093	Rp 918,903,848,065	0.778733176
KAB.DAIRI	Rp 753,620,295,971	Rp 889,613,804,786	0.847131971
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,086,517,094,707	Rp 2,470,127,645,321	0.439862732
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 451,965,422,391	Rp 974,264,084,398	0.463904428
KAB.KARO	Rp 743,586,491,997	Rp 1,470,455,672,993	0.505684398
KAB.LABUHAN BATU	Rp 106,683,184,179	Rp 211,013,045,067	0.505576251
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 340,794,628,209	Rp 729,737,181,477	0.467010092
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 287,775,579,479	Rp 854,792,818,984	0.336661204
KAB.LANGKAT	Rp 1,085,744,976,614	Rp 2,020,688,705,016	0.53731432
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 729,799,149,297	Rp 1,215,312,483,262	0.600503294
KAB.NIAS	Rp 114,029,482,299	Rp 269,716,485,807	0.422775352
KAB.NIAS BARAT	Rp 220,916,322,103	Rp 465,951,797,914	0.474118403
KAB.NIAS SELATAN	Rp 340,356,840,214	Rp 814,895,233,564	0.417669445
KAB.NIAS UTARA	Rp 216,044,511,423	Rp 631,695,697,854	0.342007255
KAB.PADANG LAWAS	Rp 468,328,633,119	Rp 717,553,001,820	0.65267462
KAB.PADANG UTARA	Rp 432,517,069,286	Rp 733,242,081,371	0.589869404
KAB.PAKPAKBHARAT	Rp 216,299,948,149	Rp 472,997,018,284	0.457296642
KAB.SAMOSIR	Rp 405,052,883,127	Rp 878,491,916,720	0.46107753
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 647,381,407,447	Rp 1,269,299,011,031	0.510030656
KAB.SIMALUNGUN	Rp 805,999,839,527	Rp 1,930,943,305,381	0.417412483
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 330,572,337,151	Rp 609,349,451,816	0.542500426
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 415,555,956,448	Rp 982,801,750,678	0.422827855
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 620,003,108,189	Rp 1,117,190,183,201	0.554966484
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 435,052,883,127	Rp 878,491,916,720	0.495226962
KOTA BINJAI	Rp 441,499,833,565	Rp 1,043,711,784,005	0.423009341
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 337,808,594,206	Rp 622,748,088,670	0.542448223
KOTA MEDAN	Rp 2,315,023,783,421	Rp 4,259,044,490,715	0.543554731
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 537,323,228,827	Rp 1,091,378,886,503	0.492334271
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 423,263,248,938	Rp 772,413,223,571	0.547975146
KOTA SIBOLGA	Rp 515,244,210,273	Rp 909,828,761,819	0.566308993
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 412,885,424,157	Rp 899,269,921,011	0.459134031
KOTA TEBING TINGGI	Rp 521,271,835,464	Rp 1,167,061,086,952	0.446653428

**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2016**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 412,779,735,495	Rp 931,614,734,437	0.44307987
KAB. BATU BARA	Rp 535,821,085,934	Rp 1,154,267,979,856	0.464208568
KAB.DAIRI	Rp 669,360,541,625	Rp 1,062,706,591,682	0.629863922
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,506,907,993,522	Rp 3,112,343,380,366	0.48417151
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 401,331,618,395	Rp 891,952,070,182	0.449947516
KAB.KARO	Rp 885,674,634,359	Rp 1,456,336,375,056	0.608152519
KAB.LABUHAN BATU	Rp 582,934,136,489	Rp 1,277,272,191,263	0.456389907
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 418,955,338,229	Rp 883,193,630,275	0.474364085
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 323,801,123,452	Rp 980,169,601,534	0.330352138
KAB.LANGKAT	Rp 972,152,721,864	Rp 2,215,047,135,449	0.438885794
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 634,486,773,300	Rp 1,425,089,851,138	0.445225803
KAB.NIAS	Rp 421,869,349,118	Rp 813,455,989,241	0.518613612
KAB.NIAS BARAT	Rp 428,343,290,634	Rp 534,832,477,458	0.424570048
KAB NIAS SELATAN	Rp 598,884,394,028	Rp 1,008,887,209,661	0.593608868
KAB.NIAS UTARA	Rp 635,821,085,934	Rp 1,164,267,979,856	0.546112319
KAB.PADANG LAWAS	Rp 511,056,773,272	Rp 1,049,569,061,025	0.486920577
KAB.PADANG UTARA	Rp 430,211,569,394	Rp 997,570,855,132	0.43125916
KAB PAKPAKBHARAT	Rp 334,463,563,919	Rp 513,194,432,899	0.651728745
KAB.SAMOSIR	Rp 331,327,121,113	Rp 779,063,334,471	0.42528907
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 632,273,756,040	Rp 1,433,427,866,991	0.441092133
KAB.SIMALUNGUN	Rp 933,573,821,664	Rp 2,218,572,431,172	0.420799343
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 531,374,684,633	Rp 1,208,268,811,127	0.439781843
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 821,635,314,857	Rp 1,069,165,690,561	0.76848268
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 553,318,208,783	Rp 1,197,874,974,979	0.461916494
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 431,017,574,178	Rp 979,614,336,729	0.439987001
KOTA BINJAI	Rp 519,071,277,320	Rp 964,637,550,866	0.538099804
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 345,222,202,510	Rp 706,216,779,805	0.488833192
KOTA MEDAN	Rp 2,217,114,414,970	Rp 4,308,116,916,024	0.514636547
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 742,623,861,611	Rp 1,082,765,291,218	0.685858577
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 337,714,890,391	Rp 817,199,713,937	0.413258699
KOTA SIBOLGA	Rp 366,224,346,378	Rp 623,453,846,568	0.587412121
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 310,382,893,361	Rp 658,060,502,765	0.471663156
KOTA TEBING TINGGI	Rp 352,745,566,614	Rp 707,957,368,504	0.498258204

**Realisasi Pengeluaran (Belanja) dan Realisasi Penerimaan  
Tahun 2017**

PEMERINTAH DAERAH	REALISASI		KINERJA KEUANGAN(%)
	PENGELUARAN	PENERIMAAN	
KAB.ASAHAN	Rp 874,862,610,705	Rp 1,487,824,513,722	0.58801465
KAB. BATU BARA	Rp 542,328,987,209	Rp 1,068,222,044,635	0.507693124
KAB.DAIRI	Rp 613,011,790,602	Rp 1,133,794,210,279	0.540672888
KAB.DELI SERDANG	Rp 1,145,698,401,581	Rp 2,332,039,840,502	0.491285947
KAB.HUMBANG HASUDUTAN	Rp 458,486,923,628	Rp 950,700,535,730	0.482262191
KAB.KARO	Rp 967,620,766,777	Rp 1,453,205,992,340	0.665852448
KAB.LABUHAN BATU	Rp 895,500,282,097	Rp 1,164,296,889,256	0.769133964
KAB.LABUHAN BATU SELATAN	Rp 431,313,983,198	Rp 896,128,797,799	0.481308027
KAB.LABUHAN BATU UTARA	Rp 465,806,214,724	Rp 1,050,277,014,266	0.443507959
KAB.LANGKAT	Rp 1,108,935,701,410	Rp 2,311,281,153,445	0.479792646
KAB.MANDAILING NATAL	Rp 733,091,400,689	Rp 1,528,153,313,076	0.479723726
KAB.NIAS	Rp 411,115,137,288	Rp 893,099,010,450	0.460324256
KAB.NIAS BARAT	Rp 310,828,409,218	Rp 645,246,701,975	0.48172026
KAB NIAS SELATAN	Rp 760,398,721,627	Rp 1,126,563,468,536	0.674971933
KAB.NIAS UTARA	Rp 552,326,682,209	Rp 1,068,987,754,635	0.516681954
KAB.PADANG LAWAS	Rp 671,705,421,614	Rp 1,113,578,885,253	0.603195185
KAB.PADANG UTARA	Rp 649,532,941,395	Rp 1,023,852,818,104	0.634400697
KAB PAKPAKBHARAT	Rp 238,798,981,452	Rp 512,671,276,740	0.465793565
KAB.SAMOSIR	Rp 340,284,971,582	Rp 823,852,199,615	0.413041285
KAB.SERDANG BEGADAI	Rp 674,120,048,943	Rp 1,386,778,177,052	0.486105175
KAB.SIMALUNGUN	Rp 1,179,688,195,061	Rp 2,302,692,922,207	0.512308082
KAB.TAPANULI SELATAN	Rp 750,692,942,240	Rp 1,245,916,483,229	0.602522683
KAB.TAPANULI TENGAH	Rp 626,349,066,702	Rp 1,094,002,131,630	0.572530024
KAB.TAPANULI UTARA	Rp 517,606,279,926	Rp 1,221,109,579,448	0.423881926
KAB.TOBA SAMOSIR	Rp 742,724,054,029	Rp 1,143,385,638,131	0.649583158
KOTA BINJAI	Rp 429,937,553,915	Rp 879,551,758,424	0.488814387
KOTA GUNUNG SITOLI	Rp 380,582,074,417	Rp 891,423,299,008	0.426937545
KOTA MEDAN	Rp 2,213,240,312,975	Rp 4,409,065,482,200	0.501974925
KOTA PEMATANGSIANTAR	Rp 364,478,159,906	Rp 869,993,438,966	0.418943573
KOTA PADANG SIDEMPUAN	Rp 428,592,401,048	Rp 862,455,261,770	0.496944503
KOTA SIBOLGA	Rp 318,176,695,491	Rp 615,864,227,552	0.516634481
KOTA TANJUNGBALAI	Rp 339,096,917,589	Rp 604,913,160,675	0.560571235
KOTA TEBING TINGGI	Rp 312,586,957,464	Rp 711,630,009,618	0.439254884